

**Strategi Pemerintah Kota Malang Menurunkan Angka Pengangguran Guna Menyokong
Ketahanan Kota**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Politik Pada Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan Peminatan Metode Ilmu Politik**

**Oleh :
Ricky Firmansyah A.**

135120507111028



**PEMINATAN GOVERNANCE DAN TRANSISI
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2018**

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI SKRIPSI

**Strategi Pemerintah Kota Malang Menurunkan Angka Pengangguran
Guna Menyokong Ketahanan Kota**

SKRIPSI

Disusun Oleh:

Ricky Firmansyah Aprilia

NIM. 135120507111028

Telah diuji dan dinyatakan lulus dalam Ujian Komprehensif
pada tanggal 5 Juli 2018

Tim Penguji,

Ketua Majelis Penguji,

Sekretaris Majelis Penguji,

Dr. Drs Hilmy Mochtar, Ms
NIP.201309 800707 1 001

Faqih Alfian S.IP, M. IP
NIK.201405 861216 1 001

Anggota Penguji I,

Anggota Penguji II,

Taufik Akbar, S.IP.,M.IP
NIK.201405 851101 1 001

Wimmy Haliim,S.IP., M.SOS
NIK. 201607 900704 1 001

Malang, 5 Juli 2018

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Brawijaya,

Prof. Dr.Unti Ludigdo, S.E., M.Si., Ak
NIP. 196908141994021001

Strategi Pemerintah Kota Malang Menurunkan Angka Pengangguran Guna Menyokong Ketahanan Kota

SKRIPSI

Disusun Oleh:
Ricky Firmansyah Aprilia
NIM. 135120507111028

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing:

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua

Dr. Drs Hilmy Mochtar, Ms.
NIP. 1952101 198203 006

Faqih Alfian S.IP, M. IP
NIK. 2014058612161001



KATA PEGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan berkah akal, kesehatan, dan kesempatan yang dilimpahkan sehingga penulis dapat menuntut ilmu menyelesaikan skripsi dengan judul: **“Strategi Pemerintah Kota Malang Menurunkan Angka Pengangguran Guna Menyokong Ketahanan Kota”**

Skripsi ini merupakan karya ilmiah yang disusun oleh penulis dengan tujuan menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya. Berkat dukungan dan bimbingan dari beberapa pihak dalam menyelesaikan studi, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya peneliti dapat melaksanakan dan menyelesaikan skripsi ini.
2. Dul Manan dan Lilis Fitriyati selaku kedua orang tua tercinta yang telah memberikan dukungan terbesar baik moril maupun materil serta doa dan nasehat kepada peneliti.
3. Seluruh Keluarga Besar yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mendukung dan mendoakan peneliti selama ini.
4. Prof. Dr Unti Ludigdo selaku dekan FISIP periode 2016, atas kesediaanya penulis menimba ilmu di fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Serta Dr. Sholih Muadi SH., MSi selaku Ketua Program Studi Ilmu Politik FISIP Universitas Brawijaya.

5. Bapak Dr. Drs Hilmy Mochtar, Ms. dan Faqih Alfian S.IP, M.IP selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan bimbingan dan arahan penelitian skripsi ini.
6. Bapak Taufik Akbar, S.IP.,M.IP dan Wimmy Haliim,S.IP., M.SOS selaku dosen penguji yang memberikan kritikan yang konstruktif sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.
7. Para tenaga pengajar (dosen) program studi Ilmu Politik serta jajaran yang senantiasa memberikan ilmu dan pengetahuannya selama masa tempuh studi penulis.
8. Keluarga besar Ilmu Politik angkatan 2013 yang mengisi dan mewarnai masa perkuliahan dengan kenang-kenangan indah dan tak terlupakan.
9. Ayu Dewi Rahmawati yang selalu memberikan dukungan sampai dengan penelitian ini diselesaikan.
10. Para sahabat “Ayang Oner” diantaranya adalah ian, jihaz, sulton, adit, reno, ricky, debytho, muhaimin, alam, ari, dika, anis yang selalu memberikan motivasi dan menghibur.
11. Para Sahabat “Kos Pak Khadam” diantaranya adalah udin, arta, mas zen, fibri, dwika, nasichin, basyir, rama, suyuti, ka’ab, muhajir yang membantu meringankan beban peneliti.
12. Para Sahabat “Rumah ichi” diataranya adalah ichi, gery, tyo yang selalu menghibur peneliti.

Semoga segalah hal yang kalian berikan adalah suatu bentuk motivasi diri bagi penulis, yang mampu menjadikan pengalaman penulis untuk menjadi lebih baik

lagi dalam mengamati dan menganalisa suatu fenomena politik. Penulis berharap, laporan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, civitas akademik FISIP Universitas Brawijaya, khususnya Program studi Ilmu Politik, untuk lebih kritis dalam mengamati fenomena politik secara langsung di Indonesia. Penulis menyadari bahwa penelitian skripsi ini masih jauh dari sempurna.

Malang, 5 Juli 2018

Penulis



ABSTRAK

Ricky Firmansyah Aprilia, Program Sarjana, Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, 2018, Strategi Pemerintah Kota Malang Menurunkan Angka Pengangguran Guna Menyokong Ketahanan Kota. Tim Pembimbing: Dr. Drs. Hilmy Mochtar, MS dan Faqih Alfian, S.IP, M.IP

Angka pengangguran di Kota Malang sangatlah tinggi bahkan pada tahun 2015 menempati kota kedua dengan jumlah TPT paling tinggi diantara kota-kota lain di Jawa Timur. Selain dari pada itu yang lebih memperhatikan adalah angka TPT Kota Malang yang dari tahun 2011 hingga tahun 2015 tidak pernah lebih tinggi dari TPT provinsi Jawa Timur. Hal ini berdampak pada ketahanan Kota Malang terhadap bahaya yang dapat timbul akibat tingginya angka pengangguran terutama pada bidang sosial dan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan serta program pemerintah Kota Malang menurunkan angka pengangguran sehingga dapat menyokong ketahanan sosial dan ekonomi di Kota Malang. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan publik milik Daniel Mazmanian dan Paul A.Sabatier. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi terhadap pihak-pihak yang terkait dengan hal ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah Kota Malang masih belum maksimal dalam penalksanaannya terutama pada bidang intensitas, kuantitas dan variasi kebijakan serta program yang dimiliki guna mengatasi beragam jenis pengangguran. Karena belum maksimalnya penanganan pengangguran di Kota Malang pada akhirnya berdampak pula pada ketahanan sosial ekonomi Kota Malang yang juga masih belum sempurna.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Ketahanan Sosial dan Ekonomi, Pengangguran Kota Malang

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Curriculum Vitae

Data Pribadi

1. Nama : Ricky Firmansyah Aprilia
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Lamongan, 23 APRIL 1995
3. Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
4. Agama : ISLAM
5. Status Pernikahan : LAJANG
6. Warga Negara : INDONESIA
7. Alamat KTP : JL.KUSUMA BANGSA GG. BERINGIN 1,
KECAMATAN LAMONGAN, KABUPATEN
LAMONGAN.
9. Nomor Telepon / HP : 081217227998
10. e-mail : RICKYAPRIL23@GMAIL.COM



Daftar Gambar

Gambar 1. Potret Kampung Topeng	76
Gambar 2. Potret Kampung.....	77
Gambar 3. Potret Showroom Dinas Sosial.....	83
Gambar 4. Potret Showroom Dinas Sosial.....	83



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	viii
Daftar Gambar	x
Daftar Tabel	xi
BAB I	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Pertanyaan Penelitian	10
1.3 Tujuan penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.4.1 Manfaat Teoritis	11
1.4.2 Manfaat Praktis.....	11
BAB II	12
2.1 Tinjauan Teoritis.....	12
2.1.1 Kebijakan Publik	12
2.1.2 Model Implementasi Kebijakan.....	16
2.1.2.1 Model Implementasi Kebijakan Daniel Mazmanian dan Paul A.Sabatier .	17
2.2 Kerangka Konseptual	21
2.2.1 Ketahanan Kota	21
2.2.1.1 Klasifikasi Bahaya Perkotaan.....	21
2.2.1.2 Prinsip Ketahanan Kota	23
2.2.2 Pengangguran	24
2.3 Penelitian Terdahulu.....	28
2.4 Kerangka Berfikir	32
BAB III	35
3.1 Jenis Penelitian	35
3.2 Lokasi dan Objek Penelitian.....	36
3.3 Fokus Penelitian	36
3.4 Teknik Penentuan Informan	37
3.5 Sumber Data	39
3.6 Teknik Pengumpulan Data	40
3.7 Teknik Analisis Data	41
3.8 Triangulasi	44

BAB IV	46
4.1	Profil Kota Malang 46
4.1.1	Gambaran Sosial Kota Malang 47
4.1.2	Gambaran Ekonomi Kota Malang 52
4.2	Profil Pengangguran Kota Malang 59
BAB V	66
5.1	Strategi Pemerintah Menurunkan Angka Pengangguran di Kota Malang 66
5.2	Hambatan Turunnya Angka Pengangguran Dari Segi Strategi Yang Diterapkan Pemerintah Kota Malang 99
BAB VI	103
6.1	Kesimpulan 103
6.2	Saran 105
Daftar Pustaka	106



Daftar Tabel

Tabel 1. Klasifikasi Bahaya Perkotaan	22
Tabel 2. Penelitian Terdahulu	29
Tabel 3. Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Penduduk menurut Kecamatan di Kota Malang, 2010 dan 2016.....	46
Tabel 4. Persentase Penduduk Usia 7-24 Tahun Menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur Sekolah, dan Partisipasi Sekolah di Kota Malang, 2015-2016.....	48
Tabel 5. Jumlah Tindakan Pidana dan Penyelesaiannya Menurut Kepolisian Sektor di Kota Malang, 2015-2016.....	49
Tabel 6. Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin Kota Malang Tahun 2012-2016	50
Tabel 7. Jumlah Keluarga Menurut Kecamatan dan Klasifikasi Keluarga di Kota Malang Tahun 2015	51
Tabel 8. Jumlah Industri Besar dan Sedang yang Aktif menurut Sub Sektor Industri di Kota Malang, 2016.....	53
Tabel 9. Jumlah Industri Besar dan Sedang Yang Aktif Menurut Kecamatan di Kota Malang, 2016.....	54
Tabel 10. Produk Domestik Regional Bruto Kota Malang Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2010-2016.....	56
Tabel 11. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kota Malang Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen), 2011-2016.....	57
Tabel 12. Data Pengangguran Terbuka Kota Malang Menurut Jenis Kelamin dan Usia pada Tahun 2013-2015	61
Tabel 13. Data Pengangguran Terbuka Kota Malang Menurut Jenis Kelamin dan Usia pada Tahun 2017	62
Tabel 14. Data Pengangguran Terbuka Kota Malang Menurut Tingkat Pendidikan pada Tahun 2017	63

HALAMAN PERNYATAAN**Nama: Ricky Firmansyah Aprilia****NIM. 135120507111028**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **Strategi Pemerintah Kota Malang Menurunkan Angka Pengangguran Guna Menyokong Ketahanan Kota** adalah benar-benar karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi tersebut diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Aapabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.

Malang, 5 Juli 2018

Pembuat pernyataan,

Ricky Firmansyah Aprilia
NIM. 135120507111028

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bencana atau apa pun yang sifatnya mengancam kehidupan menjadi sebuah bahaya bagi kehidupan masyarakat yang ada karena hal tersebut dapat menyebabkan kerugian diberbagai sendi kehidupan. Tanpa perlu memandang tempat terjadinya, pasti akan menyebabkan kerugian bagi masyarakat yang tinggal ditempat terjadinya bahaya baik itu desa, kabupaten atau pun kota. Bencana merupakan sebuah bahaya, yang bahkan pada saat ini tidak saja dapat disebabkan karena fenomena alam. Menurut *World Bank* dalam kajian *urban resilience* (Ketahanan Kota) memberikan klasifikasi bahaya yang dapat terjadi diperkotaan yaitu bahaya yang disebabkan oleh alam, teknologi dan sosial-ekonomi.¹

Ketahanan Kota secara sederhana dapat didefinisikan sebagai kemampuan sebuah sistem dalam menghadapi guncangan dan juga stress yang dapat timbul di masyarakat akibat dari bahaya. Bencana yang terjadi diperkotaan pasti akan menyebabkan berbagai guncangan dan stres pada masyarakat. Ketahanan Kota merupakan sebuah konsep yang dibuat guna mengelola berbagai guncangan dan tekanan yang mungkin terjadi di kota. Salah satu aspek dalam ketahanan kota dalam kajian, bahaya sosio ekonomi menjadikan angka pengangguran yang tinggi sebagai sebuah bahaya yang terjadi di perkotaan.

Mengenai pengangguran di Kota Malang pada lima tahun terakhir dari tahun 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 mengalami siklus naik turun. Indikator utama ketenagakerjaan yang sering digunakan sebagai indikasi keberhasilan dalam

¹ *The World Bank* (2015), *Investing In Urban Resilience*, Washington DC : *The World Bank*, hlm 20

menangani masalah pengangguran di suatu wilayah adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pada Tahun 2011 angka pengangguran di Kota Malang sebesar 22.185 jiwa kemudian naik drastis pada tahun 2012 jumlah pengangguran mencapai 31.807 jiwa, jika di prosentasikan dalam tingkat pengangguran terbuka (TPT) kenaikannya mencapai 2,56 persen. Tentu hal ini, bukan masalah sepele yang dapat dibiarkan begitu saja karena jumlah pengangguran hanya dalam satu tahun melonjak begitu dratis. Pada tahun 2013 angka pengangguran perlahan terus mengalami penurunan menjadi 30.581 jiwa pada Tahun 2014 dan menjadi 29.606 jiwa pada Tahun 2015.²

Dari Jumlah pengangguran yang ada di Kota Malang selama periode kepemimpinan [Ir. H. Mochamad Anton](#) dari tahun 2013 hingga pada data terakhir pada tahun 2015 menunjukkan bahwa penganggur laki-laki selalu lebih tinggi dari jumlah penganggur perempuan. Hal ini ditunjukkan dengan penganggur laki-laki berjumlah 17.531 jiwa sedangkan jumlah penganggur perempuan berjumlah 16.092 jiwa, kemudian pada tahun 2014, penganggur laki-laki berjumlah 15.462 jiwa dan penganggur perempuan berjumlah 15.119 jiwa, lalu penganggur menurut jenis kelamin pada tahun 2015 menunjukkan penganggur laki-laki berjumlah 19.943 sedangkan penganggur perempuan berjumlah 10.163 jiwa.

Jumlah penurunan pengangguran yang menjadi *trend* dalam 3 tahun terakhir yakni pada tahun 2013, 2014, 2015 tidak diberengi dengan turunya TPT pada tahun 2015. Dari data yang tersedia menunjukan TPT Kota Malang sebesar 7,28 persen pada tahun 2015 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2014 yang hanya berjumlah 7,22 persen. TPT Kota Malang sendiri pada 3 tahun

² <https://malangkota.bps.go.id/> diakses pada 12/8/2017 jam 5.20 WIB

terakhir dari tahun 2011 hingga tahun 2013 mengalami *trend* naik, jumlah TPT pada tahun 2011 berjumlah 5,19 persen naik drastis hingga 7,68 persen pada tahun 2012, kemudian masih terus naik pada tahun 2013 menjadi 7,72 persen. Pada tahun 2014 TPT kota Malang mengalami penurunan dari 7,72 persen menjadi 7,22 persen namun pada tahun 2015 TPT kota Malang kembali naik mencapai 7,28 persen. Jumlah TPT Kota Malang dalam 5 (lima) tahun terakhir ini bahkan selalu lebih besar dari TPT Jawa Timur. Hal ini sungguh miris, bahkan TPT Kota Malang pada tahun 2015 menempati tempat kedua setelah Kediri yang menempati posisi pertama dengan jumlah TPT sebesar 8,46 persen kemudian Kota Malang 7,28 persen, Kota Surabaya 7,01 persen, Kota Pasuruan 5,57 persen, Kota Madiun 5,1 persen, Kota Mojokerto 4,88 persen, Kota Batu 4,29 persen, Kota Probolinggo 4,01 persen Kota Blitar 3,8 persen.³ Tidak menjadi nomor satu dalam hal tingkat TPT di Jawa Timur bukan berarti menjadikan Kota Malang telah baik dalam penanganan masalah pengangguran, justru ini adalah masalah besar bagi pemerintah Kota Malang.

Data terakhir TPT Kota Malang pada tahun 2015 menurut kelompok umur menunjukkan jumlah tertinggi pengangguran yang ada di Kota Malang adalah penduduk usia 20-24 tahun dengan prosentase mencapai 32,52 persen dari total seluruh pengangguran terbuka di Kota Malang pada tahun 2015 yang berjumlah 29.606 jiwa dan yang paling rendah adalah penduduk usia 60 tahun keatas yang hanya berjumlah 1,23 persen dari total pengangguran yang ada pada tahun 2015. Pada usia 20-24 tahun jika menurut jenjang pendidikan di Indonesia seharusnya pada usia ini adalah usia dimana individu telah menuntut ilmu setidaknya sampai

³ <https://malangkota.bps.go.id> diakses pada 14/8/2017 jam 15.03 WIB

pada tahap SMA/SMK atau lebih tinggi lagi telah menamatkan pendidikan pada tingkat akademi/ perguruan tinggi. Jumlah TPT ini berbanding lurus dengan jumlah TPT menurut tingkat pendidikan yang menunjukkan bahwa 3 posisi teratas TPT ditempati oleh lulusan akademi/ perguruan tinggi sebesar 38,05 persen dari total seluruh pengangguran terbuka di Kota Malang pada tahun 2015 yang berjumlah 29.606 jiwa, kemudian SMK sebesar 28,48 persen, kemudian yang terakhir adalah SMA/MA sebesar 14,11 persen dari total pengangguran yang ada pada tahun 2015.⁴

Kota Malang yang terdiri dari 5 kecamatan memiliki tingkat pengangguran yang berbeda-beda pula. Pada tahun 2011 data mengenai pengangguran terbuka paling tinggi ada di Kecamatan Blimbing dengan total tingkat pengangguran menurut kelompok umur berjumlah 2896 Jiwa, Kecamatan kedua dengan tingkat pengangguran menurut kelompok umur yang paling tinggi adalah Kecamatan Sukun dengan tingkat pengangguran mencapai 2626 jiwa, Kecamatan Kedungkandang menduduki tempat ketiga sebagai kecamatan penyumbang tingkat pengangguran di Kota Malang dengan jumlah pengangguran mencapai 2033 jiwa, kemudian Kecamatan Lowokwaru dengan tingkat pengangguran menurut kelompok umur berjumlah 1475 dan yang terakhir adalah kecamatan Klojen dengan tingkat penganggutan menurut kelompok umur berjumlah 1143. Namun, dari data terbaru menunjukkan bahwa Kecamatan Kedungkandang adalah penyumbang angka pengangguran terbesar untuk Kota Malang hingga pada akhir tahun 2016. Kabid Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja Disnakertrans, M Sidik mengatakan “Jumlah pengangguran itu turun dari tahun 2015. Memang

⁴ <https://malangkota.bps.go.id> diakses pada 15/8/2017 jam 07.34 WIB

mayoritas pengangguran itu lulusan [SMA](#) atau [SMK](#). Wilayah yang paling banyak di Kecamatan [Kedungkandang](#), sekitar 7,7 persen dari 5 kecamatan. Selain jumlah penduduk yang banyak, penduduknya juga jarang berinteraksi dengan dunia luar.⁵

Tingginya angka pengangguran di Kota Malang hingga menjadikan Kota Malang sebagai Kota dengan angka pengangguran tertinggi kedua di Jawa Timur. Jika terus dibiarkan maka bukan mustahil pengangguran yang ada di Kota Malang akan menjadi sebuah ancaman yang dapat melumpuhkan sendi-sendi penyokong kehidupan yang ada di Kota. Membicarakan mengenai bahaya perkotaan tentu tidak akan lepas dari masyarakat yang menerima dampak dari bahaya tersebut. Dalam kajian ketahanan kota, golongan masyarakat pertama yang akan terkena dampak yang ditimbulkan akibat bahaya krisis sosial-ekonomi ini adalah masyarakat-masyarakat miskin di Kota Malang. Masyarakat tersebut adalah masyarakat yang paling rentan karena tidak memiliki aset yang mencukupi untuk menunjang kehidupan mereka. Masyarakat miskin mudah terkena guncangan dan stress, bukan hanya karena seringnya kaum miskin tidak dilindungi akan guncangan karena iklim, tapi juga karena minimnya bantuan untuk menjaga, melindungi, kemampuan beradaptasi, serta sumber daya yang dimiliki kaum miskin kota. Perubahan iklim terus menerus memberikan guncangan dan stress, sehingga menghambat upaya pengurangan kemiskinan.⁶

Membicarakan mengenai tingkat Kemiskinan di Kota Malang dari tahun 2011-2015 menunjukkan arah penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011 di Kota Malang menunjukkan jumlah penduduk miskin adalah 45.400 jiwa (7,22

⁵ <http://suryamalang.tribunnews.com/2017/01/09/mayoritas-pengangguran-di-kota-malang-ada-di-kedungkandang-ini-penyebabnya> dikutip pada 15/8/2017 jam 10.20 WIB

⁶ The World Bank (2015),), *Investing In Urban Resilience*, Washington DC : The Wolrd Bank, hlm 21

persen dari 828.491 jiwa). Pada tahun-tahun setelahnya hingga sampai pada tahun 2015 pun Kota Malang mampu terus menurunkan angka kemiskinan. Pada tahun 2012 jumlah penduduk miskin Kota Malang adalah 43.400 (5,19 persen dari 834.527 jiwa). Kemudian pada tahun 2013 jumlah penduduk miskin adalah 40.900 jiwa (4,85 persen dari 840 803 jiwa). Turunnya jumlah penduduk miskin di Kota Malang masih terus berjalan pada tahun 2014 jumlah penduduk miskin adalah 40.640 (4,80 persen dari 845 973 jiwa). Hingga pada tahun 2015 kesuksesan pemerintah kota malang dalam menurunkan penduduk miskin masih terus berlanjut dengan dibuktikan jumlah penduduk miskin Kota Malang turun hingga berjumlah 39.100 jiwa (4,60 persen dari 851 298).

Sejumlah besar Masyarakat miskin yang ada di Kota Malang yang hingga pada tahun 2015 mencapai 39.100 jiwa atau sekitar 4,60 persen dari dari total semua penduduk Kota Malang ini adalah golongan yang paling rentan terhadap bahaya yang ada di perkotaan. Melihat lebih jauh kemiskinan di Kota Malang, harus dapat melihat tempat-tempat yang merupakan kantong kemiskinan di Kota Malang agar tidak terjadi salah identifikasi penanganan kedepannya. Angka kemiskinan paling parah Kota Malang ada di Kecamatan Kedungkandang dengan total 49.078 keluarga miskin. Selanjutnya disusul kecamatan Sukun dengan total mencapai 46.755 keluarga miskin, Kecamatan Blimbing 42.363 keluarga miskin, lalu Kecamatan Lowokwaru dengan total 39.150 keluarga miskin dan terakhir Kecamatan Klojen dengan hanya 26.833 keluarga miskin.⁷

Permasalahan mengenai kemiskinan tidak hanya disebabkan karena tidak adanya lapangan pekerjaan namun ada banyak faktor lain, seperti kecilnya

⁷ https://malangkota.bps.go.id/website/pdf_publicasi/Kota-Malang-Dalam-Angka-2017.pdf
dikutip pada 15/8/2017 jam 13.20 WIB

pendapatan yang dimiliki atau tidak sesuaiannya upah kerja dengan standar yang ditetapkan oleh kota (UMK). Upah minimum Kota/Kabupaten (UMK) kota malang pada Tahun 2014 berkisar Satu Juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah (Rp 1.587.000) dan pada saat ini UMK Kota Malang adalah Dua Juta dua ratus tujuh puluh dua ribu seratus enam puluh tiga rupiah (Rp. 2.272.163,-).⁸ sedangkan garis kemiskinan di Jawa Timur pada tahun 2014 berkisar dua ratus enam puluh lima ribu dua ratus tiga rupiah (Rp. 265.203,-) pada semester satu dan pada semester dua berkisar dua ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus limapuluh tiga rupiah (Rp. 278.653,-) sedangkan untuk saat ini pada semester satu adalah tiga ratus tiga puluh Sembilan ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah (Rp. 339.537,-). Dengan UMK Kota Malang seharusnya individu yang bekerja di perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Malang jauh dari angka kemiskiskinan sehingga hal tersebut tidak menjadi permasalahan.

Namun, tentunya perusahaan yang ada di Kota Malang memiliki kapasitas maksimal untuk menampung jumlah pekerja yang ada. Di Kota Malang setidaknya terdapat terdapat 894 perusahaan yang termasuk didalamnya usaha kecil, sedang hingga besar namun tidak termasuk jumlah usaha mikro yang ada di Kota Malang. Dengan jumlah 894 perusahaan yang ada di Kota Malang, jumlah pekerja yang dimiliki Total adalah 56.267 pekerja, jika di bedakan menurut jumlah kelamin maka dari sejumlah perusahaan ada di Kota Malang mempekerjakan 27.663 pekerja pria dan 28.604 pekerja wanita.⁹ Dan serta dengan disokong oleh usah-usaha mikro yang tak terhitung jumlahnya di Kota Malang

⁸ <http://malangkota.go.id/2016/12/08/upah-minimum-kota-malang-2017-disosialisasikan/> pada 15/8/2017 jam 16.00 WIB

⁹ <http://disnaker.malangkota.go.id/database/data-perusahaan/> dikutip pada 15/8/2017 jam 19.00 WIB

masih menyisakan pengangguran sebesar 29.606 jiwa yang dapat menimbulkan potensi bahaya di perkotaan.

Tingginya angka kemiskinan memang tidak berkaitan langsung dengan angka pengangguran, dalam pengertian yang sederhana dari data yang ada di Kota Malang adalah kemiskinan disebabkan faktor lain, selain pengangguran. Tapi jika penduduk miskin saja yang memiliki pekerjaan tidak memiliki jaminan untuk kelangsungan hidupnya maka akan lebih buruk lagi jika terkena dampak dari bahaya pengangguran yang ada diperkotaan.

Pemerintah Kota (selanjutnya disingkat Pemkot) bukannya diam melihat keadaan pengangguran yang ada di Kota Malang, menurut laporan kinerja Kota Malang tahun 2016 dalam perencanaan dan perjanjian kinerja disebutkan bahwa untuk mencapai Visi pemerintah Kota Malang 2013-2018 setidaknya dilakukan 4 strategi pokok yakni *pro poor*, *pro job*, *pro growth*, *pro environment*. 4 strategi pokok yang dijalankan pemerintah Kota Malang ini berarti pemerintah Kota Malang memberikan dukungan secara penuh dalam mengakomodasi keempat hal ini. Sebagai gambaran sederhana dalam hal ini pemerintah Kota Malang secara serius menjalankan program-program mengentaskan kemiskinan seperti memberikan pelatihan-pelatihan kepada warga miskin yang kemudian diberikan bantuan modal berupa alat-alat produksi dan lain sebagainya.

Maka dari hal ini dapat dilihat pemerintah kota setidaknya telah menjalankan tiga strategi sekaligus yakni *pro poor*, *pro job*, *pro growth*. Dengan memberdayakan masyarakat miskin tentu telah memenuhi salah satu strategi yakni *pro poor*, kemudian dengan memberikan mereka pekerjaan melalui pemberdayaan ini berarti telah terbukti memenuhi *pro job* dan yang terakhir

karena program ini berbasis pada masyarakat dengan harapan masyarakat dapat berkembang berarti telah memenuhi strategi *pro job*. Pemerintah Kota Malang sendiri sangat serius dalam menangani masalah kemiskinan dan pengangguran. Pada pelaksanaannya untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran untuk memperkuat ketahanan yang ada di Kota Malang, pemerintah Kota Malang tidak cukup hanya menjalankan strategi tersebut tapi juga harus memiliki strategi yang menggabungkan berbagai elemen, baik itu bersumber dari pemerintah itu sendiri maupun non-pemerintahan.

Setidaknya terdapat empat komponen yang menjadi dasar terbentuknya ketahanan kota, yaitu: infrastruktur, institusi, ekonomi dan sosial. Dari keempat aspek ini, pengangguran merupakan sebuah permasalahan sosial yang mana pendekatan paling tepat digunakan untuk mengkaji permasalahan ini haruslah pendekatan yang berbasis pada komponen ketahanan kota dari segi sosial juga. Selain dari segi sosial, pengangguran juga mempengaruhi kondisi perekonomian kota itu sendiri baik secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga untuk mengkaji mengenai masalah pengangguran tidak hanya dapat dilakukan dari sisi sosial saja, namun juga harus dari segi ekonomi, sehingga pendekatan yang paling sesuai untuk mengkaji masalah ini adalah dari segi sosial-ekonomi. Pengangguran dan kemiskinan di Kota Malang bukanlah permasalahan yang dapat disepelekan begitu saja, karena sampai dengan data terakhir Kota Malang, angka penganggurannya bahkan jauh lebih tinggi dari pada Provinsi Jawa Timur pada tahun 2015 yang hanya berjumlah 4,47 persen sedangkan Kota Malang sendiri hampir mencapai dua kali lipat dari TPT Provinsi Jawa Timur yakni mencapai 7,28 persen. Karenanya hal ini dapat berdampak pada keadaan sosial-ekonomi

Kota Malang itu sendiri yang kemudian apa bila keadaan ini dibiarkan maka masyarakat akan terkena imbasnya secara langsung terutama masyarakat dengan perekonomian lemah karenanya Kota Malang . Dengan tingginya angka pengangguran dan kerentanan masyarakat miskin di Kota Malang, menjadikan Kota Malang sebagai objek yang menarik untuk diteliti mengenai **“Strategi Pemerintah Kota Malang Menurunkan Angka Pengangguran Guna Menyokong Ketahanan Kota”**

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berkaitan dengan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya maka penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana strategi pemerintah kota untuk menurunkan pengangguran di Kota Malang guna menyokong ketahanan kota?
2. Apa yang menjadi hambatan strategi pemerintah Kota Malang guna menurunkan angka pengangguran?

1.3 Tujuan penelitian

Tujuan ditulisnya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui strategi pemerintah untuk menurunkan angka penangguran yang ada di Kota Malang.
2. Mengetahui strategi pemerintah kota guna menyokong ketahanan kota lewat kebijakan serta program-program pengentasan pengangguran.
3. Mengidentifikasi kelemahan sistem ketahanan Kota Malang.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat ditulisnya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran dalam ranah ilmu politik khususnya berfokus kepada keadaan yang ditimbulkan akibat pengangguran. Kota Malang merupakan salah satu Kota dengan tingkat pengangguran yang sangat tinggi di Jawa Timur. Sehingga pemerintah Kota Malang harus menerapkan strategi-strategi terkait penanganan pengangguran agar pengangguran tidak menjadi sebuah bahaya yang mempengaruhi berbagai aspek di dalam Kota Malang itu sendiri.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Memberikan informasi tentang penerapan strategi pemerintah Kota Malang terkait penanganan masalah pengangguran.
2. Penelitian terhadap ketahanan kota terkait pada pengangguran khususnya mengenai strategi untuk menurunkan dan membantu pengangguran yang ada masih sedikit maka penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai penanganan pengangguran di Kota Malang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teoritis

2.1.1 Kebijakan Publik

Kebijakan (*Policy*) adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya.¹ Pada definisi yang dikemukakan ini, mudah dipahami bahwa kebijakan sangat berkaitan dengan konteks politik. Sehingga dapat dikatakan bahwa kebijakan adalah salah satu bentuk dari tindakan politik.

Selain definisi yang dikemukakan diatas, terdapat berbagai definisi lain mengenai kebijakan. Menurut Hoogerwerf) menyatakan bahwa obyek dari ilmu politik adalah kebijakan pemerintah, proses terbentuknya, serta akibat-akibatnya. Yang dimaksud dengan kebijakan umum (*public policy*) di sini menurut Hoogerwerf ialah, membangun masyarakat secara terarah melalui kekuasaan.²

Jika kebijakan ditekankan pada aspek kebijakan umum maka akan muncul anggapan setiap masyarakat memiliki beberapa tujuan yang sama. Keinginan dan cita-cita yang ada pada masyarakat ini hanya bisa dicapai melalui usaha bersama. Bukanlah hal sederhana untuk dapat mewujudkan keinginan dan cita-cita yang di masyarakat, untuk itu perlu ditentukan rencana-rencana yang mengikat yang dituang dalam kebijakan oleh pihak yang berwenang.

¹ Budiardjo, Miriam.2010. *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. Hlm 20

² Ibid. hlm 21

Kebijakan umum atau lebih sederhananya disebut kebijakan publik memiliki beragam definisi. Easton (1969) memberikan pengertian kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. Sehingga cukup pemerintah yang dapat melakukan sesuatu tindakan kepada masyarakat dan tindakan tersebut merupakan bentuk dan sesuatu yang dipilih oleh pemerintah yang merupakan bentuk dan pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat.³ Selain definisi yang disampaikan oleh Easton, terdapat defisi lain mengenai kebijakan publik yang disampaikan oleh William N. Dunn, yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu proses ketata pemerintahan dan administrasi pemerintah yang menghasilkan keputusan pemerintah, dimana instansi yang terkait mempunyai wewenang atau kekuasaan dalam mengarahkan masyarakat dan tanggung jawab melayani kepentingan umum.⁴

Definisi tersebut memberikan gambaran pemahaman mengenai kebijakan publik, yaitu; tindakan, tujuan dan berkaitan dengan urusan publik. Kebijakan publik secara konsisten menunjukkan ciri tertentu yang dilakukan oleh pemerintah. Analisis kebijakan sendiri merupakan suatu aktivitas intelektual dan praktis ditujukan menciptakan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan tentang dan di dalam proses kebijakan.⁵

³ Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI. Hlm 2

⁴ Naihasy, H. Syahrin. 2006. *Kebijakan Publik/Public Policy menggapai Masyarakat Madani*. Yogyakarta: Mida Pustaka. Hlm 18

⁵ Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Hlm 44

Samudro Wibowo menjelaskan bahwa kebijakan negara merupakan bagian keputusan politik yang berupa program perilaku untuk mencapai tujuan masyarakat negara. Kesimpulan dari pandangan ini adalah: (1) kebijakan publik sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah; dan (2) kebijakan publik sebagai keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu. Hasil dari analisis kebijakan pada umumnya sebuah rekomendasi kebijakan yang lebih lanjut atau kebijakan alternatif yang lain.⁶

Kebijakan dalam prakteknya terdapat tahapan-tahapan yang termuat didalamnya. Tahap-tahap kebijakan publik adalah sebagai berikut⁷:

a. Tahap Penyusunan Agenda

Para pejabat yang di pilih dan di angkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk kedalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi focus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

b. Tahap Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari

⁶ Samudra, Wibowo. 1994. *Evaluasi Kebijakan* Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm 190

⁷ Budi Winarno. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS. Hlm 35-37

pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternative atau pilihan kebijakan (policy alternatives/ policy options) yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakn masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang di ambil untuk memecahkan masalah. Pada tahap ini, masing-masing aktor akan “ bermain “ untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

c. Tahap Adopsi Kebijakan

Dari sekian banyak alternative kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternative kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislative, consensus antara direktur lembaga atau keputusan pengadilan.

d. Tahap Impelementasi kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternative pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan adminstrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah di ambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang membolisasikan sumberdaya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (implementors), namun beberapa yang lain mungkin akan di tentang oleh para pelaksana.

e. Tahap Evaluasi Kebijakan

Pada tahap ini kebijakan public yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan public pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, memecahkan masalah yang di hadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang di inginkan. Dalam penelitian ini mengambil tahap tentang evaluasi kebijakan publik. Karena dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui tentang dampak kebijakan dari reklamasi pantai di wilayah pesisir Bandar

2.1.2 Model Implementasi Kebijakan

implementasi dari kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor guna menentukan keberhasilannya , dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh model implementasi yang mampu menjamin kompleksitas masalah yang akan diselesaikan melalui kebijakan tertentu. Model implementasi kebijakan ini tentunya diharapkan merupakan model yang semakin operasional sehingga mampu menjelaskan hubungan kausalitas antar variabel yang terkait dengan kebijakan .⁸

2.1.2.1 Model Implementasi Kebijakan Daniel Mazmanian dan Paul A.Sabatier

Model implementasi yang dikembangkan Daniel Mazmanian dan Paul A.Sabatier (1983) yang mengemukakan tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu karakteristik dari masalah (*Trackability of*

⁸ Sumaryadi. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: CV Citra Utama Hlm 88

the problem), sebuah karakteristik kebijakan (*Ability of statute to structure implementation*) dan lingkungan kebijakan (*Non Statutory Variables Affecting Implementation*).⁹

Model Mazmanian dan Sabatier disebut model Kerangka Analisis Implementasi *Framework for Implementation analysis*:

a. Karakteristik masalah

1. Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan. Disatu pihak ada beberapa masalah sosial secara teknis mudah dipecahkan, seperti kekurangan persediaan air minum bagi penduduk atau harga beras yang tiba-tiba naik. Dipihak lain terdapat masalah-masalah sosial yang relatif sulit dipecahkan seperti kemiskinan, pengangguran, korupsi, dan sebagainya. Oleh karena itu, sifat masalah itu sendiri akan mempengaruhi mudah tidaknya suatu diimplementasikan.
2. Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran. Ini berarti suatu program akan relatif mudah diimplementasikan apabila kelompok sasarannya heterogen, maka implementasi program akan relatif lebih kuat, karena tingkat pemahaman setiap anggota kelompok sasaran terhadap program relatif berbeda-beda.
3. Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi. Sebuah program akan relatif sulit diimplementasikan apabila sasarannya mencakup semua

⁹ A. G Subarsono, 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar Hlm 94

populasi. Sebaliknya sebuah program relatif mudah diimplementasikan apabila jumlah kelompok sasaran tidak terlalu besar.

4. Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan. Sebuah program yang bertujuan memberikan pengetahuan atau bersifat kognitif akan relatif mudah diimplementasikan daripada program yang bertujuan untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakat.

b. Karakteristik kebijakan

1. Kejelasan isi kebijakan

Ini berarti semakin jelas dan rinci isi sebuah kebijakan akan lebih mudah untuk diimplementasikan karena implementor mudah memahami dan menterjemahkan dalam tindakan nyata. Sebaliknya, ketidakjelasan kebijakan ini merupakan potensi lahirnya distorsi dalam implementasi.

2. Besarnya alokasi sumberdaya finansial terhadap kebijakan tersebut.

Sumberdaya keuangan adalah faktor krusial untuk setiap program sosial. Setiap program juga memerlukan dukungan staff untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan administrasi dan teknis, serta memonitor program, yang semuanya itu perlu biaya.

3. Seberapa besar ada keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana. Kegagalan sebuah program sering disebabkan kurangnya koordinasi vertikal dan horizontal antar instansi yang terlibat dalam implementasi program.

4. Kejelasan dan konsistensi aturan.

5. Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan. Kasus korupsi yang terjadi di negara-negara dunia ketiga, khususnya di Indonesia salah satu penyebab utamanya adalah rendahnya tingkat komitmen aparat dalam melaksanakan tugas pekerjaan atau program-program.
6. Seberapa luas akses kelompok di luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan. Suatu program yang memberikan peluang luas bagi masyarakat untuk terlibat di dalamnya akan relatif mendapatkan dukungan daripada program yang tidak melibatkan masyarakat. Masyarakat akan merasa terasing apabila hanya menjadi penonton terhadap program yang ada di wilayahnya.

c. Lingkungan Kebijakan

1. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi

Masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik akan relatif mudah menerima program-program pembaruan dibanding dengan masyarakat yang masih tertutup dan tradisional. Demikian juga, kemajuan teknologi akan membantu dalam proses keberhasilan implementasi sebuah program, karena program-program tersebut dapat disosialisasikan dan diimplementasikan dengan bantuan teknologi modern.

2. Dukungan publik terhadap kebijakan

Kebijakan yang memberikan insentif biasanya mudah mendapatkan dukungan publik. Sebaliknya kebijakan yang bersifat dis-insentif, seperti kenaikan harga BBM atau kenaikan pajak akan kurang mendapat dukungan publik.

3. Sikap dari kelompok pemilih (*constituent groups*)

Kelompok pemilih yang ada dalam masyarakat dapat mempengaruhi implementasi kebijakan melalui berbagai cara antara lain: 1) kelompok pemilih dapat melakukan investasi terhadap keputusan yang dibuat badan-badan pelaksana melalui berbagai komentar dengan maksud mengubah keputusan; 2) kelompok pemilih dapat memiliki kemampuan untuk mempengaruhi badan-badan pelaksana secara tidak langsung melalui kritik yang dipublikasikan terhadap kinerja yang dijalankan oleh badan-badan pelaksana, dan membuat pernyataan yang ditujukan kepada badan legislatif.

4. Tingkat komitmen keterampilan dari aparat dan implementor

Pada akhirnya, komitmen aparat pelaksana untuk merealisasikan tujuan yang telah tertuang dalam kebijakan adalah variabel yang paling krusial. Aparat dari badan-badan pelaksana harus memiliki keterampilan dalam membuat prioritas tujuan dan selanjutnya merealisasikan prioritas tujuan tersebut.

2.2 Kerangka Konseptual

2.2.1 Ketahanan Kota

Ketahanan kota sendiri didefinisikan sebagai kemampuan sistem, kesatuan, masyarakat, atau orang untuk beradaptasi dengan berbagai kondisi yang berubah serta menahan guncangan sambil tetap mempertahankan fungsi dasarnya.¹⁰

Ketahanan kota sangatlah erat kaitannya pada perlindungan masyarakat miskin kota. Karena masyarakat miskin kota sangat mudah terkena pengaruh dari dampak negatif yang disebabkan oleh bahaya perkotaan. Membicarakan mengenai bahaya tentu tidak lepas dari resiko dan dampak yang ditimbulkan. Resiko yang dihadapi oleh kaum miskin kota dalam menghadapi bahaya berhubungan dengan masalah keterbatasan ekonomi, lokasi, akses infrastruktur dan layanan pengurangan risiko yang rendah. Serta masyarakat miskin kota juga memiliki keterbatasan pada pengelolaan dan manajemen risiko. Masyarakat miskin mudah terkena guncangan dan stress, bukan hanya karena seringkali kaum miskin tidak dilindungi dari guncangan karena iklim, tapi juga karena minimnya bantuan untuk menjaga, melindungi, kemampuan beradaptasi, serta sumber daya yang dimiliki kaum miskin kota. Perubahan iklim terus menerus memberikan guncangan dan stress, sehingga menghambat upaya pengurangan kemiskinan.¹¹

2.2.1.1 Klasifikasi Bahaya Perkotaan

Ketahanan sering dikaitkan dengan kapasitas masyarakat untuk menghadapi dampak perubahan iklim dan bencana, yang merupakan tantangan pembangunan utama zaman saat ini. Perubahan iklim dan bencana telah memberikan gambaran dampak negatif yang dapat diterima oleh kota, sehingga adaptasi perubahan iklim dan

¹⁰ *The World Bank* (2015), *Investing In Urban Resilience*, Washington DC : *The World Bank*, hlm 19

¹¹ *Ibid.*, hlm 21

manajemen risiko bencana telah menjadi inti agenda ketahanan perkotaan secara keseluruhan. Hal ini terutama terjadi karena perubahan iklim dapat meningkatkan intensitas dan frekuensi bahaya yang ada. Dalam beberapa tahun terakhir, definisi ketahanan telah diperluas untuk mencakup aspek-aspek utama yang tidak hanya mencakup bahaya alam, tetapi juga hambatan, tekanan teknologi, sosial, ekonomi, politik dan budaya. Berikut adalah klasifikasi bahaya perkotaan¹²

Tabel 1. Klasifikasi Bahaya Perkotaan

Alam	Teknologi	Sosial-ekonomi
<ul style="list-style-type: none"> • Kekeringan • Gempa Bumi • Epidemi/Pandemi • Temperatur Ekstrem • Banjir • Wabah Serangga • Badai Besar • Erupsi Gunung • Hewan Liar 	<ul style="list-style-type: none"> • Bangunan runtuh • Tumpahan kimia • Ancaman cyber • Ledakan Api • Kebocoran gas • Kecelakaan industri • Tumpahan minyak • Polusi • Keracunan • Radiasi • Kecelakaan transportasi • Kerusakan sistem (misalnya TIK, Air dan sanitasi, energi, Kesehatan, pendidikan, dll) 	<ul style="list-style-type: none"> • Bisnis yang terkendala • Korupsi • Pergeseran demografis • Krisis ekonomi • Pengangguran tinggi • Mogok kerja / kerusuhan • Pembantaian • Konflik politik • Konflik sosial • Krisis pasokan (mis. Makanan, air, perumahan, Energi, dll) • Terorisme • Perang

Sumber: diadaptasi dari *UN-Habitat's City Resilience Profiling Tool and based on classification of hazards by EM-DAT and PreventionWeb*

Dalam tabel 1.1 telah disebutkan bahwa salah satu bahaya perkotaan adalah tinggi angka pengangguran. Karenanya angka pengangguran yang tiap tahun bisa naik atau pun turun karena siklus dari kota itu sendiri, harus ditekan sedemikian rupa sehingga tidak menjadi bahaya dikemudian hari. Salah satu cara yang ditawarkan oleh bank dunia untuk dapat mengatasi bahaya pengangguran yang tinggi adalah

¹² *The World Bank (2015), Investing In Urban Resilience, Washington DC : The Wolrd Bank, hlm 20*

dengan memiliki ketahanan kota yang baik. Melalui program ini pemerintah kota diharapkan memiliki strategi-strategi yang jitu dalam mengatasi bahaya perkotaan.

2.2.1.2 Prinsip Ketahanan Kota

Ketahanan adalah kemampuan suatu sistem, komunitas, atau masyarakat yang terkena bahaya melawan, menyerap, mengakomodasi, dan memulihkan dari efek bahaya segera dan efisien dengan melestarikan dan memulihkan struktur dasar yang penting. Masyarakat yang tangguh adalah yang bisa menyerap gangguan, perubahan, mengatur ulang, dan tetap mempertahankan struktur dasar dan memberikan layanan disaat yang bersamaan.¹³

Sebagai sebuah konsep, ketahanan bisa diterapkan pada berbagai lapis masyarakat dan segala jenis gangguan: alam, buatan manusia, atau kombinasi dari keduanya. Ketahanan bencana dapat dikatakan seperti masyarakat sendiri yang membangun sebuah sistem perkotaan dan merencanakan bagaimana mengatasi gangguan. Dalam prakteknya, mencari cara untuk mengoptimaliasasi ketahanan bukanlah hal yang mudah. Mengatasi resiko bencana dalam konteks ketahanan mendorong perencana kota untuk mempertimbangkan dampak dari bencana bencana dan membuat pembangunan dalam jangka panjang untuk menyesuaikan diri serta mengatasi risiko yang tidak pasti. Tujuannya adalah agar masyarakat bersiap menghadapi bencana sebanyak mereka bersiap menghadapi kekeringan atau banjir. Dengan memecah ketahanan kota menjadi empat komponen, infrastruktur, kelembagaan, ekonomi, dan sosial, isu mendasar dapat diatasi dan kapasitas dapat

¹³ Jha, Abhas K., Todd W. Miner, Suzana Stanton-Geddes (eds.) (2013), *Building Urban Resilience : Principle, tools and practice*, Washington DC : The World Bank, hlm 10

diperdalam. Sementara laporan ini membahas semua komponen ketahanan bencana, fokusnya adalah pada ekonomi dan sosial.¹⁴

Komponen Ketahanan Kota

Economic

Social

- ***Economic resilience***

Economic resilience mengacu pada perbedaan ekonomi masyarakat di bidang pekerjaan, jumlah usaha, dan kemampuan mereka untuk kembali berfungsi setelah bencana.

- ***Sosial resilience***

Sosial resilience mengacu pada gambaran demografis suatu masyarakat menurut usia, etnisitas, kecacatan, status sosial-ekonomi, dan pengelompokan lainnya, serta modal sosialnya. Meski sulit dihitung, modal sosial mengacu pada rasa suatu kaum, kemampuan suatu kaum didalam masyarakat untuk beradaptasi, dan rasa keterikatan terhadap suatu tempat.¹⁵

2.2.2 Pengangguran

Definisi pengangguran adalah jumlah tenaga kerja dalam perekonomian yang secara aktif mencari pekerjaan tetapi belum memperolehnya.¹⁶ Selanjutnya International Labor Organization (ILO) memberikan definisi pengangguran yaitu:

¹⁴ Jha, Abhas K., Todd W. Miner, Suzana Stanton-Geddes (eds.) (2013), *Building Urban Resilience : Principle, tools and practice*, Washington DC : The World Bank, hlm 10-11

¹⁵ Jha, Abhas K., Todd W. Miner, Suzana Stanton-Geddes (eds.) (2013), *Building Urban Resilience : Principle, tools and practice*, Washington DC : The World Bank hlm. 11

¹⁶ Sukirno, Sadono. 2004. *Pengantar Teori Makroekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- a. Pengangguran terbuka adalah seseorang yang termasuk kelompok penduduk usia kerja yang selama periode tertentu tidak bekerja, dan bersedia menerima pekerjaan, serta sedang mencari pekerjaan.
- b. Setengah pengangguran terpaksa adalah seseorang yang bekerja sebagai buruh karyawan dan pekerja mandiri (berusaha sendiri) yang selama periode tertentu secara terpaksa bekerja kurang dari jam kerja normal, yang masih mencari pekerjaan lain atau masih bersedia mencari pekerjaan lain/tambahan.

Menurut case dan fair dalam buku prinsip-prinsip ekonomi makro, pengangguran dapat dibedakan ke dalam beberapa jenis yaitu sebagai berikut.¹⁷

a. **Pengangguran friksional (frictional unemployment)**

Pengangguran Friksional adalah bagian pengangguran yang disebabkan oleh kerja normalnya pasar tenaga kerja. Istilah itu merujuk pada pencocokan pekerjaan atau keterampilan jangka pendek. Selain itu pengangguran Friksional juga merupakan jenis pengangguran yang timbul sebagai akibat dari adanya perubahan didalam syarat-syarat kerja, yang terjadi seiring dengan perkembangan atau dinamika ekonomi yang terjadi. Jenis pengangguran ini dapat pula terjadi karena berpindahnya orang-orang dari satu daerah ke daerah lain, atau dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain, dan akibatnya harus mempunyai tenggang waktu dan berstatus sebagai penganggur sebelum mendapatkan pekerjaan yang lain.

¹⁷ Case, Karl E. dan Ray C. Fair. 2004. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Makro*. Edisi Kelima, Cetakan Kesatu. Jakarta: PT. Indeks. Hlm. 24

b. Pengangguran musiman (seasonal unemployment)

Pengangguran ini berkaitan erat dengan fluktuasi kegiatan ekonomi jangka pendek, terutama terjadi di sektor pertanian. Yang dimaksud dengan pengangguran musiman yaitu pengangguran yang terjadi pada waktu-waktu tertentu didalam satu tahun. Biasanya pengangguran seperti ini berlaku pada waktu dimana kegiatan bercocok tanam sedang menurun kesibukannya. Dengan demikian, jenis pengangguran ini terjadi untuk sementara waktu saja.

c. Pengangguran siklis (cyclical unemployment)

Pengangguran siklis atau pengangguran konjungtur adalah Pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan-perubahan dalam tingkat kegiatan perekonomian. Pada waktu kegiatan ekonomi mengalami kemunduran, perusahaan-perusahaan harus mengurangi kegiatan produksinya. Dalam pelaksanaannya berarti jam kerja dikurangi, Sebagian mesin produksi tidak digunakan, dan sebagian tenaga kerja berhenti. Dengan demikian, kemunduran ekonomi akan menaikkan jumlah dan tingkat pengangguran.

d. Pengangguran struktural (structural unemployment)

Dikatakan pengangguran struktural karena sifatnya yang mendasar. Pencari kerja tidak mampu memenuhi persyaratan yang dibutuhkan untuk lowongan pekerjaan yang tersedia. Hal ini terjadi dalam perekonomian yang berkembang pesat. Makin tinggi dan rumitnya proses produksi atau teknologi produksi yang digunakan, menuntut persyaratan tenaga kerjayang juga makin tinggi. Dilihat dari sifatnya, pengangguran struktural lebih sulit diatasi dibanding

pengangguran friksional. Selain membutuhkan pendanaan yang besar, juga waktu yang lama. Ada dua kemungkinan yang Menyebabkan pengangguran struktural yaitu sebagai akibat dari kemerosotan permintaan atau sebagai akibat dari semakin canggihnya teknik memproduksi. Faktor yang kedua memungkinkan suatu perusahaan menaikkan produksi dan pada waktu yang sama mengurangi pekerja.

Selain jenis-jenis pengangguran seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pengangguran memiliki beberapa bentuk. menurut Edgar O. Edward yang dapat dibedakan sebagai berikut¹⁸ :

a. Pengangguran terbuka (*open unemployment*)

Baik sukarela (mereka yang tidak mau bekerja karena mengharapkan pekerjaan yang lebih baik) maupun secara terpaksa (mereka yang mau bekerja tetapi tidak memperoleh pekerjaan).

b. Setengah pengangguran (*under unemployment*)

mereka yang bekerja lamanya (hari, minggu, musiman) kurang dari yang mereka biasa kerjakan.

c. Tampaknya bekerja tetapi tidak bekerja secara penuh

mereka yang tidak digolongkan sebagai pengangguran terbuka dan setengah pengangguran, termasuk di sini adalah:

¹⁸ Arsyad, Lincolin. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. BPFE. Yogyakarta. Hlm. 35

- Pengangguran tak kentara (*disguised unemployment*) Misalnya para petani yang bekerja di lading selama sehari penuh, padahal pekerjaan itu sebenarnya tidak memerlukan waktu selama sehari penuh.
- Pengangguran tersembunyi (*hidden unemployment*) Misalnya oaring yang bekerja tidak Sesuai dengan tingkat atau jenis pendidikannya.
- Fenomena ini merupakan kenyataan yang terus berkembang di kalangan pegawai pemerintah. Di beberapa negara, usia pensiun dipermuda sebagai alat menciptakan peluang bagi yang muda untuk menduduki jabatan di atasnya.

d. Tenaga kerja yang lemah (*impaired*)

Mereka yang mungkin bekerja penuh tetapi intensitasnya lemah karena kurang gizi atau memiliki penyakit.

e. Tenaga kerja yang tidak produktif

mereka yang mampu untuk bekerja secara produktif tetapi karena sumber daya-sumber daya penolong kurang memadai maka mereka tidak bisa menghasilkan sesuatu dengan baik.

2.3 Penelitian Terdahulu

Terkait dengan penelitian ketahanan kota, terutama dengan fokus bencana sosio-eknomi yang didalamnya mengangkat angka pengangguran yang tinggi adalah sebuah bentuk bencana pada perkotaan, peneliti menggunakan berbagai disiplin ilmu yang dirasa memiliki kemiripan dengan penelitian ini. Berikut adalah penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan :

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

NO	SUBJEK PERBANDINGAN	PENELITIAN I	PENELITIAN II	PENELITIAN III
1	Nama Peneliti	M. Faruq Rosya Ridho	Irma Arfiani	Fahma Sari Fatma
2	Jenis Penelitian	Jurnal	Skripsi	Tesis
3	Tahun Penelitian	2010	2014	2005
4	Judul Penelitian	Pengangguran dan Pembangunan Perkotaan. (studi kasus : Kota Palembang).	Kebijakan menekan angka pengangguran melalui program pelatihan kerja di Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan sosial Kota Magelang.	Pengaruh Inflasi dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Indonesia.
5	Metode Penelitian	<i>System Dynamics</i>	Deskriptif Kualitatif	Kuantitatif
6	Deskripsi	Penelitian ini mendeskripsikan pengaruh tingkat pengangguran pada pembangunan Kota Palembang.	Penelitian ini mendeskripsikan mengenai kebijakan menekan angka pengangguran melalui program pelatihan kerja di Disnakertransos Kota Magelang.	Penelitian ini menunjukkan dampak yang diakibatkan oleh inflasi serta pengangguran terhadap angka kemiskinan yang ada di Indonesia
7	Perbedaan	Penelitian ini menggunakan teori teori pertumbuhan ekonomi. serta metode <i>System Dynamics</i> .	Sudut pandang yang berbeda. Teori yang digunakan sangat berbeda. Penelitian ini menggunakan teori-teori kebijakan.	Sudut pandang yang jauh berbeda. Pada tesis ini mengambil sudut pandang ekonomi sebagai dasar untuk penelitian.
8	Persamaan	Penggunaan tema yang sama yakni pengangguran.	Menggunakan metode Deskriptif Kualitatif dalam memandang masalah pengangguran.	Penggunaan tema yang sama yakni pengangguran dan kemiskinan

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2017

Penelitian terdahulu pertama yang ditulis oleh Rizky Rahmana Syahputra dalam bentuk jurnal ilmiah dengan judul “**Pengangguran dan Pembangunan Perkotaan. (studi kasus : Kota Palembang)**”. Penelitian ini membahas mengenai tingkat pengangguran dapat mempengaruhi pembangunan wilayah perkotaan. Teori yang digunakan adalah teori pertumbuhan ekonomi. Serta metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *system dynamic*. Berdasarkan temuan studi, kebijakan yang paling efektif dan efisien adalah kebijakan komprehensif, yaitu dengan menerapkan kebijakan pada berbagai variabel determinan secara bersamaan. Kebijakan terbaik adalah dengan menggabungkan secara bersamaan kebijakan perubahan permintaan akhir dengan kebijakan perubahan teknologi proses produksi dan pembatasan migrasi masuk.

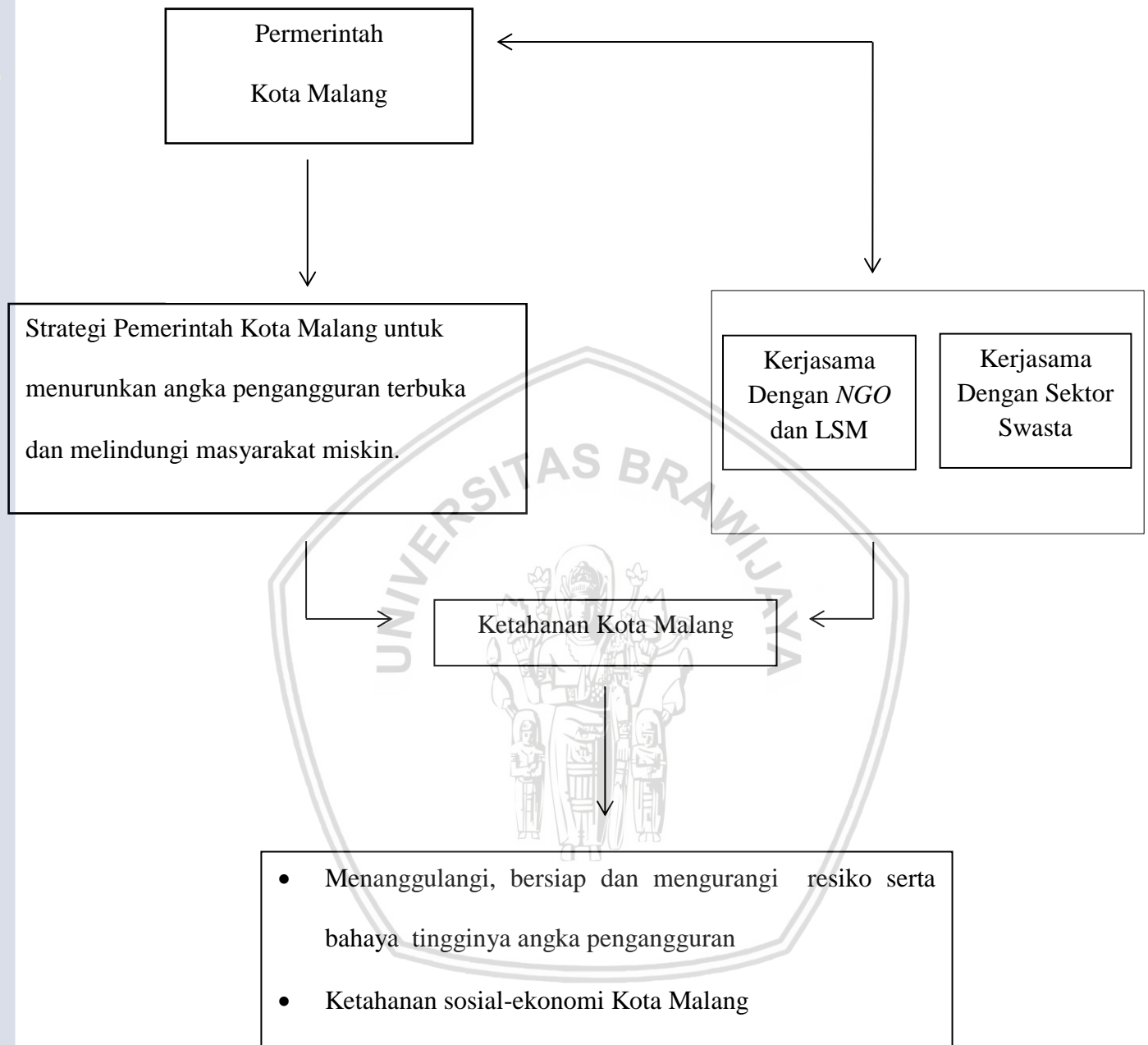
Penelitian terdahulu yang kedua ditulis oleh Irma Arfiani dalam bentuk skripsi dengan judul “**Kebijakan menekan angka pengangguran melalui program pelatihan kerja di Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi dan Sosial Kota Magelang**”. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kebijakan menekan angka pengangguran melalui program pelatihan kerja ini telah berjalan optimal. Peran Disnakertransos Kota Magelang ialah sebagai stabilisator, innovator, modernisator, pelopor, dan pelaksana program pelatihan kerja. Terdapat 11 jenis pelatihan kerja dengan jumlah peserta keseluruhan sebanyak 240 orang. Hal-hal terkait tujuan, peserta, materi, metode, media dan manfaat pelatihan telah sesuai standard dan prosedur yang ditetapkan, selain itu output telah benar-benar sampai ke kelompok sasaran. Faktor penghambat dalam penyelenggaraan program yaitu

berkaitan dengan ketersediaan waktu, instruktur, dan fasilitas. Faktor-faktor tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia.

Penelitian terdahulu yang terakhir ditulis oleh Fahma Sari Fatma dalam bentuk tesis dengan judul **“Pengaruh Inflasi dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Indonesia”**. Penelitian ini seperti penelitian yang pertama yakni mengambil sudut pandang serta teori-teori ekonomi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Hasil akhir yang didapat dalam penelitian ini adalah inflasi dan pengangguran berpengaruh secara signifikan dan searah dengan jumlah kemiskinan.

Berdasar pada tiga penelitian yang sudah ada sebelumnya, hal yang sangat membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya dapat disimpulkan menjadi beberapa hal yaitu (1) Sudut pandang yang diambil, (2) perbedaan teori, (3) perbedaan konsep yang digunakan. Serta dalam penelitian pertama terdapat perbedaan metode digunakan.

2.4 Kerangka Berfikir



Sumber: diolah oleh peneliti 2017

Pemerintah Kota Malang guna mencapai ketahanan kota yang stabil berupaya menekan angka pengangguran. Program-program yang ditawarkan

pemerintah Kota Malang diantaranya adalah dengan memberikan pelatihan kepada para pengangguran yang ada di Kota Malang, selain memberikan pelatihan pemerintah Kota Malang juga memberikan bantuan modal berupa alat usaha sehingga para peserta pelatihan yang merupakan pengangguran dapat segera langsung melakukan kegiatan yang produktif guna mendapatkan penghasilan dan tidak menjadi pengangguran lagi. Barang atau hasil produksi yang telah dibuat oleh peserta pelatihan juga dibantu oleh pemerintah dalam hal pemasarannya sehingga para hasil produksi tersebut dapat tersalurkan dengan baik tidak terjadi kendala hal pemasaran.

Menekan angka pengangguran guna menyokong ketahanan kota tidak dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang sendirian sehingga perlu adanya kerjasama dengan sektor swasta dan NGO atau LSM yang ada di Kota Malang secara berkelanjutan. Kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah Kota Malang tidak hanya membantu para pengangguran guna mendirikan usaha mandiri sendiri tapi juga memberikan pelatihan-pelatihan kerja yang kemudian pemerintah bekerja sama dengan pihak-pihak yang bergerak disektor swasta guna menyalurkan tenaga kerja. Selain, itu pemerintah juga mengadakan kerjasama lain dengan sektor swasta yakni dengan mengadakan *job fair*, yang mana dalam acara *job fair* pemerintah berperan sebagai penjemputan untuk para pengangguran yang sedang mencari pekerjaan dengan pihak-pihak swasta yang membutuhkan tenaga kerja.

Tidak hanya sampai disana, pemerintah Kota Malang juga bekerjasama dengan NGO atau pun LSM yang ada di Kota Malang guna menangani masalah pengangguran ini. Namun, kerjasama yang dilakukan pemerintah dengan pihak

NGO dan LSM sedikit berbeda dengan yang dilakukan oleh pemerintah dengan sektor swasta. Kerjasama yang dilakukan pemerintah Kota Malang dengan pihak NGO dan LSM hanya sebatas menampung. Pengertian menampung disini adalah menampung para pengangguran yang termasuk kedalam golongan masyarakat lemah seperti para penderita disabilitas, gelandangan, pengemis dan lain sebagainya. Namun, tentu pihak NGO dan LSM yang menampung para pengangguran tidak akan selamanya menampung para pengangguran yang tergolong penderita masalah kesejahteraan sosial ini. Penampungan hanya akan dilakukan sampai dengan para pengangguran yang tergolong penderita masalah kesejahteraan sosial ini mendapat pekerjaan atau pun sudah dapat menjadi produktif kembali. Guna mencapai hal tersebut dapat dilakukan dengan bantuan program-program yang dimiliki pemerintah.

Ketahanan Kota dapat terbentuk dengan baik manakala kerjasama yang berkesinambungan antara pemerintah dengan pihak NGO serta LSM dan sektor swasta dapat terjalin sehingga pemerintah tidak menjadi pihak tunggal yang menyokong ketahanan kota.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif-deskriptif, bertujuan untuk mendalami suatu kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Metode analisis deskriptif kualitatif yaitu menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang mengumpulkan hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di dalam antara fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi, dan sebagainya.¹ Data yang nantinya diperoleh dalam penelitian ini adalah data kualitatif, berupa hasil wawancara maupun bagan yang diperoleh oleh penulis dari narasumber yang terpercaya.

Metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.² Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif untuk menjelaskan pola strategi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Malang untuk mencegah bencana sosio-ekonomi di perkotaan berupa tingginya angka pengangguran guna melindungi masyarakat miskin.

¹ I Made Wiratha. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: C.V Andi Offset. Hlm. 155

² Nazir, M. 1988. *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, Hlm. 63

3.2 Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kota Malang. Utamanya di Dinas serta pihak-pihak lain yang terkait masalah pengangguran dan kemiskinan di Kota Malang. Contoh Dinas yang memiliki keterkaitan dengan masalah pengangguran dan kemiskinan adalah Disnakertrans (Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi) dan Dinas Sosial. Serta pihak lain yang turut berpengaruh dalam masalah pengangguran dan kemiskinan seperti *NGO* dan pihak swasta yang ada di Kota Malang.

3.3 Fokus Penelitian

Sebuah penelitian perlu untuk memiliki batasan-batasan agar penelitian tersebut dapat terfokus serta tidak melebar dari pembahasan dan tujuan yang ingin disampaikan oleh penulis. Selain dari pada hal tersebut, dibuatnya batasan penelitian adalah agar tulisan yang dibuat menjadi lebih sistematis dan terarah. Berdasarkan hal tersebut fokus dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini berfokus kepada strategi untuk menekan angka pengangguran yang dijalankan pemerintah Kota Maalang tersebut dapat melindungi masyarakat miskin dari resiko dan dampak multi-dimensional yang dapat ditimbulkan dari bahaya sosial-ekonomi yang mungkin terjadi di perkotaan.
2. Mengkaji Ketahanan kota dari aspek sosial dan institusional yang dimiliki Kota Malang.

3.4 Teknik Penentuan Informan

Dalam sebuah penelitian untuk mendapatkan informasi guna menyerap data-data yang diperlukan untuk penelitian dibutuhkan seorang atau beberapa

informan. Dalam penelitian, Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian.³ Oleh sebab itu, informan merupakan salah satu bagian yang sangat penting bagi penelitian ini. Dalam penelitian ini, jika tanpa adanya informan maka data yang didapat akan sangat sulit terserap karena terbatasnya informasi yang ada.

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive* yang artinya informan dipilih sengaja berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah dilakukan oleh penulis. Salah pertimbangan yang dilakukan oleh penulis adalah kompetensi yang dimiliki dalam bidang yang dikuasai oleh informan tersebut.

Memilih informan juga tidak hanya berdasarkan kebutuhan yang dimiliki oleh peneliti namun juga perlu mengkaraktersistikannya, hal ini dilakukan untuk memudahkan peneliti. Seorang informan memiliki karakteristik yang perlu diklasifikasikan menjadi beberapa bagian seperti, (i) Informan Kunci, adalah seseorang yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian; (ii) Informan utama, adalah mereka yang terlibat langsung dalam interaksi social dan turun ke lapangan, (iii) Informan tambahan, yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam penelitian.⁴ Namun, dalam penelitian ini penulis hanya akan menggunakan informan kunci, karena pertimbangan yang dilakukan penulis hal tersebut sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini. Informan kunci yang dimaksud oleh penulis adalah pihak-pihak

³ J. Moleong, Lexy. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya. Hlm 97

⁴ Kriyantono, Rachmat,. 2006. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Prenada hlm. 149

yang berhubungan dan bertanggung jawab langsung dengan strategi serta kebijakan pemerintah Kota Malang dalam menekan angka pengangguran terbuka serta perlindungan sosial terhadap masyarakat miskin yaitu Disnakertrans (dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi) dan Dinas Sosial Kota Malang. Berikut adalah beberapa informan kunci dalam penelitian ini :

1. Indras Sri Citowati, Sp, MM. selaku Kepala Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Balita dan Anak Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Dinas Sosial Kota Malang
2. Drs. Hendro Suyoto, MM selaku Kepala seksi Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Malang
3. Ibu Anjani, seorang warga Kampung Topeng (identitas disamarkan)
4. Mas Ilyas, pelaku usaha yang mendapat pelatihan dari Disnaker
5. Mas Malvin, pelaku usaha di Kota Malang
6. Bapak Saiful, seorang tuna netra yang mendapat pelatihan oleh dinas sosial yang dikini telah bekerja di salah satu panti pijat tuna netra di Kota Malang (identitas disamarkan)
7. dr. Djoko Witjaksono selaku ketua II YPAC Kota Malang
8. Eric Kusuma Hadi selaku staff divisi *public relation* PT. Bentoel Distribusi Utama (identitas disamarkan)

3.5 Sumber Data

Penelitian yang dilakukan penulis harus menghasilkan data-data yang sesuai dengan fokus permasalahan yang sedang diteliti. Pencarian data tersebut dibagi dalam dua sumber yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang didapatkan melalui wawancara yang dilakukan peneliti dengan dua orang sumber yakni dengan Indras Sri Citowati, Sp, MM selaku Kepala Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Balita dan Anak Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Dinas Sosial Kota Malang, Drs. Hendro Suyoto, MM Kepala seksi Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Malang serta warga kampung topeng, pelaku usaha di Kota Malang, perwakilan pihak YPAC Kota Malang, dan salah seorang dari persahaan rokok di Kota Malang. Selain itu peneliti juga melakukan observasi pada keadaan masyarakat yang mendapatkan pelatihan dari Dinas Sosial atau dari Dinas Ketenagakerjaan di Kota Malang. Dari semua hal diatas, peneliti juga telah melakukan dokumentasi dalam bentuk foto atau pun audio suara dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikaji serta dihimpun oleh peneliti. data-data tersebut diambil dari dokumentasi maupun *literature* yang berhubungan dengan ketahanan kota dan pengangguran yang ada di Kota Malang. Data sekunder yang diambil peneliti berupa dokumen mengenai penangguran, jumlah penderita masalah kesejahteraan sosial di Kota Malang.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Penyusunan penelitian, akan menggunakan teknik pengumpulan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui 3 (tiga) cara yaitu

wawancara, observasi, studi literatur terkait penelitian dan studi dokumentasi.

Berikut uraian cara peneliti dalam melakukan pengumpulan data penelitian ini:

Teknik Pengumpulan Data Primer

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan tanya jawab dengan tatap muka (*face to face*) Antara pewawancara (*interviewer*) dan yang diwawancarai (*interviewee*) tentang masalah yang diteliti, dimana pewawancara bermaksud memperoleh persepsi, sikap, dan pola pikir dari yang diwawancarai yang relevan dengan yang diteliti.⁵ Wawancara dilakukan oleh peneliti di Dinas Sosial dan Dinas Ketenagakerjaan Kota Malang serta masyarakat yang mengikuti program-program Dinas Sosial dan Dinas Ketenagakerjaan Kota Malang.

b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala dan kegiatan yang berlangsung. Dengan melakukan pengamatan sesuai dengan tujuan atau apa yang ditelitinya kemudian dilakukan pencatatan atas pengamatan yang diperoleh.⁶

Observasi dilakukan oleh peneliti di kampung topeng yang merupakan program “desaku menanti” milik pemerintah yang mana di desa ini menampung para mantan gelandangan dan pengemis untuk diberdayakan sehingga memiliki pekerjaan yang lebih baik.

⁵ Gunawan, Imam. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara hlm. 162

⁶ Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung : CV. Alfabeta. Hlm 310

Teknik Pengumpulan Data Sekunder

a. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari dokumen yang ada. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang.⁷ Dokumen-dokumen yang digunakan peneliti untuk menunjang penelitian ini antara lain adalah data-data mengenai kependudukan Kota Malang, data mengenai keadaan sosial dan ekonomi Kota Malang, data pengangguran selama beberapa tahun terakhir di Kota Malang, serta literature-literatur mengenai ketahanan kota dan penangguran.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah “ proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang diarahkan. Menurut Janice McDrury analisis data kualitatif adalah⁸ :

1. Membaca atau mempelajari data, menandai kata-kata kunci dan gagasan yang ada didalam data.
2. Mempelajari kata-kata kunci itu, berupaya menemukan tema-tema yang berasal dari data.
3. Menuliskan “model” yang ditemukan.

Penelitian ini, menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang meliputi analisis-analisis berdasarkan obyek penelitian yang telah

⁷ Ibid. dlm. 82

⁸ Lexy J. Moleong .2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya. Hlm 247-248

disusun sebelumnya, sehingga penelitian ini dapat terarah. Data yang diperoleh akan dianalisis dan diinterpretasikan menggunakan analisis kualitatif. Data yang dianalisis menurut Miles dan Huberman yaitu data Condensation, data display, dan conclusion drawing / verification. Bahwa analisis data terdiri dari tiga urutan kegiatan yaitu⁹ :

a. Reduksi data

Semakin lama peneliti mengumpulkan data di lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, semakin kompleks dan rumit. Untuk itu perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data menurut Sugiyono berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan reduksi ini data tersebut akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.¹⁰

b. Penyajian data

Setelah reduksi data dilakukan, langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data tersebut. Display data adalah upaya menyajikan data untuk melihat gambaran secara keseluruhan data atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Menurut Miles dan Huberman dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.

c. Penarikan kesimpulan data

Langkah terakhir dalam proses analisis data dalam penelitian ini adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu suatu upaya untuk mencari makna

⁹ Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung : CV. Alfabeta hlm.91

¹⁰ *Ibid.*, hlm 92

terhadap data yang dikumpulkan dengan mencari pola, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul dan sebagainya. Kesimpulan dalam analisis data penelitian kualitatif merupakan kesimpulan awal. Kesimpulan ini harus dilakukan verifikasi dengan cara mencari data baru atau mengkonsultasikannya dengan orang yang mempunyai keahlian sesuai dengan bidang yang diteliti. Setelah data bertambah dan analisis dilakukan secara terus menerus hingga datanya jenuh, maka kesimpulan ini akan semakin *grounded* dan akan menjadi kesimpulan akhir.

Dalam proses mencari dan menemukan kesimpulan hingga kesimpulan tersebut menjadi kesimpulan akhir memerlukan pembuktian bahwa data yang menjadi landasan dalam penarikan kesimpulan itu betul-betul merupakan data yang valid. Itulah sebabnya, dalam penelitian kualitatif, sebelum peneliti sampai pada kesimpulan akhir harus melakukan pengujian terhadap keabsahan data yang digunakan untuk mendukung keabsahan penelitian secara keseluruhan.

3.8 Triangulasi

Dalam penelitian ini, menggunakan teknik validitas data. Teknik ini bertujuan untuk menentukan keabsahan data yang diperoleh oleh peneliti dengan menggunakan teknik pemeriksaan. Penelitian ini menggunakan dua teknik pemeriksaan yaitu teknik triangulasi sumber dan triangulasi teori. Triangulasi sumber adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara membandingkan dan mengecek ulang kebenaran suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Menurut Moloeng Keabsahan data pada akhirnya akan berkaitan dengan valid atau tidaknya data yang bertujuan untuk mendapatkan data yang benar-benar mendukung dan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan dari

penelitian ini.¹¹ Beberapa hal yang dirasa perlu untuk dilakukan pemeriksaan adalah:

1. Data hasil wawancara
2. Data tentang pengangguran di Kota Malang
3. Data tentang keadaan sosial di Kota Malang
4. Data tentang keadaan ekonomi di Kota Malang
5. Gambar atau foto
6. Hasil observasi di lapangan

Triangulasi teori dipilih oleh peneliti guna menganalisis temuan-temuan baru di lapangan yang berhubungan dengan fokus penelitian. Skripsi ini dibuat dengan tujuan untuk mengamati dan memahami fenomena yang diangkat sebagai tema dan judul dalam penelitian ini, yang kemudian dibandingkan teori yang telah dipilih sebelumnya.

¹¹ Lexy J. Moleong .2006. *Op.cit.* Hlm 350

BAB IV

GAMBARAN UMUM

4.1 Profil Kota Malang

Kota Malang merupakan salah satu dari delapan kota yang ada di Jawa Timur selain Kota Batu, Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Kediri, Kota Blitar. Kota merupakan wilayah tingkat II setingkat dengan kabupaten, Hal ini telah diatur dan dijelaskan dalam “Undang-Undang No. 18 Tahun 1965 Tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah”. Kota Malang sampai dengan pada tahun 2016 jumlah penduduknya adalah 856.410 jiwa dan merupakan kota dengan kepadatan penduduk kedua setelah Kota Surabaya yang menduduki peringkat pertama.

Tabel 1. Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Penduduk menurut Kecamatan di Kota Malang, 2010 dan 2016

Kecamatan	Jumlah Penduduk			Pertumbuhan Penduduk per Tahun	
	2000	2010	2016*	2000-2010	2010-2016*
Kedungkandang	150 262	174 477	188 175	1,51	1,27
Sukun	162 094	181 513	191 513	1,14	0,90
Klojen	117 500	105 907	103 637	-1,03	-0,36
Blimbing	158 556	172 333	178 564	0,84	0,59
Lowokwaru	168 570	186 013	194 521	0,99	0,75
Kota Malang	756 982	820 243	856 410	0,81	0,72

Sumber : Sensus Penduduk (SP) 2000, 2010 dan Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035

Pada **tabel 3** dapat dilihat bahwa jumlah kepadatan penduduk tertinggi di Kota Malang dari tahun 2000 sampai dengan 2016 adalah di Kecamatan Lowokwaru dan tingkat kepadatan penduduk yang paling rendah adalah di Kecamatan Klojen. Di Kota Malang sendiri seperti yang terlihat di **tabel 3** jumlah pertumbuhan penduduk per lima tahun dari tahun 2000-2010 berjumlah 0,81% dan pada tahun 2010-2016 berjumlah 0,72%.

Membicarakan mengenai masyarakat kota tentu tidak akan lepas dari segudang permasalahan yang ada didalamnya. Guna menjamin keberlangsungan kehidupan masyarakat yang tinggal didalamnya sebuah Kota harus memiliki sebuah strategi ketahanan Kota. Ketahanan Kota sendiri memiliki berbagai macam aspek dan strategi yang digunakan sesuai dengan bahaya yang dihadapi sebuah kota, salah satu aspek kajian ketahanan Kota dan dianggap sebagai sebuah bahaya yang dapat mengancam keadaan kota adalah mengenai masalah pengangguran. Namun, sebelum melihat lebih jauh mengenai permasalahan pengangguran di Kota Malang akan lebih baik apabila melihat gambaran mengenai keadaan sosial dan ekonomi yang ada di Kota Malang terlebih dahulu. Hal ini, dilakukan agar permasalahan mengenai pengangguran ini dapat dilihat dengan lebih objektif.

4.1.1 Gambaran Sosial Kota Malang

Melihat gambaran sosial Kota Malang dapat dilihat melalui berbagai macam sudut pandang, namun guna mencegah meluasnya penelitian ini, maka sudut pandang keadaan sosial yang diambil hanyalah dari segi pendidikan, Kriminalitas dan kemiskinan di Kota Malang. Berikut adalah keadaan sosial dan ekonomi penduduk Kota Malang berdasarkan keadaan pendidikan, kriminalitas dan kemiskinan:

Tabel 2. Persentase Penduduk Usia 7-24 Tahun Menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur Sekolah, dan Partisipasi Sekolah di Kota Malang, 2015-2016

Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Sekolah	Partisipasi Sekolah					
	Tidak/Belum Pernah Sekolah		Masih Sekolah		Tidak Sekolah Lagi	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
Laki-Laki						
7-12	-	-	100,00	100,00	-	-
13-15	-	-	97,84	93,95	2,16	6,05
16-28	2,29	5,31	81,85	69,44	15,86	25,25
19-24	0,45	-	55,86	38,81	43,69	61,19
7-24	0,61	0,79	78,79	67,82	20,61	31,4
Perempuan						
7-12	-	-	100,00	100,00	-	-
13-15	-	-	100,00	97,98	-	2,02
16-18	-	-	75,62	87,94	24,38	12,06
19-24	1,40	-	57,89	51,19	40,72	48,81
7-24	0,63	-	77,05	75,78	22,33	24,21
Laki-laki dan Perempuan						
7-12	-	-	100,00	100,00	0,00	0,00
13-15	-	-	98,95	95,75	1,05	4,25
16-18	1,21	2,76	78,91	78,32	19,88	18,92
19-24	0,95	-	56,93	44,96	42,12	55,04
7-24	0,62	0,41	77,92	71,69	21,46	27,90

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2015-2016

Dapat dilihat pada **tabel 4** bahwa angka penduduk yang tidak/belum pernah sekolah pada tahun 2015-2016 sangatlah sedikit apabila dibandingkan dengan penduduk yang tengah atau tidak lagi sekolah. Sehingga dapat diambil sebuah gambaran berdasarkan pada data yang terdapat **tabel 4** mengenai pendidikan di Kota Malang bahwa hampir seluruh penduduk yang tinggal di Kota Malang pernah mengenyam pendidikan. Setidaknya sampai dengan pendidikan wajib 9 tahun atau sampai dengan usia 15 tahun hampir seluruh penduduk Kota Malang telah

mendapatkannya dan hanya menyisakan 1,05 persen pada tahun 2015 dan 4,25 persen pada tahun 2016.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya selain melihat gambaran sosial Kota Malang selain melalui pendidikan, gambaran sosial Kota Malang juga perlu dilihat melalui kondisi kriminalitas yang ada di Kota Malang. Hal ini dilakukan menyangkut angka kriminalitas dapat mengganggu stabilitas kota yang artinya dapat mengancam Ketahanan Kota itu sendiri.

Tabel 3. Jumlah Tindakan Pidana dan Penyelesaiannya Menurut Kepolisian Sektor di Kota Malang, 2015-2016

Kepolisian Sektor	Lapor		Selesai		Sisa	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
Kedungkandang	216	203	165	112	51	91
Sukun	196	265	106	98	90	167
Klojen	188	244	154	148	34	96
Blimbing	234	232	99	85	135	147
Lowokwaru	523	548	253	167	270	381
Sat Reskrim Polres Kota Malang	1984	2749	84	1106	1120	1643
Jumlah Total	3341	4241	1641	1716	1700	2525

Sumber : Kepolisian Negara RI Resort Kota Malang

Pada **tabel 5** dapat dilihat bahwa Jumlah Kejahatan tertinggi terjadi di Kecamatan Lowokwaru. Pada tahun 2015 hingga tahun 2016 jumlah kejahatan di Kecamatan Lowokwaru bahkan tidak mengalami penurunan sama sekali justru mengalami peningkatan dari 523 menjadi 548. Seperti yang terlihat pada **tabel 5** bahwa angka kejahatan di Kota Malang sama sekali tidak mengalami penurunan bahkan angka tersebut membesar hingga 26,9 % dari angka 3341 pada tahun 2016 menjadi 4241 pada tahun 2017.

Mengkaji mengenai ketahanan kota tentu tidak akan terlepas dari keadaan kerentanan masyarakat Kota Malang yang hidup dibawah garis kemiskinan. profil mengenai masyarakat miskin adalah bagian dari kajian ketahanan kota guna melihat secara objektif keadaan ketahanan kota melalui sudut pandang sosial dan ekonomi. Di Kota Malang masih terdapat banyak keluarga dan masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan yang hidup tersebar diseluruh Kecamatan yang ada di Kota Malang. Pemerintah Kota Malang dari tahun ke tahun telah menuai hasil yang cukup memuaskan karena keberhasilan pemerintah kota yang menekan angka kemiskinan tiap tahunnya hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin Kota Malang Tahun 2012-2016

Tahun	Garis Kemiskinan	Penduduk Miskin	
		Jumlah	Presentase
2012	330 765	43 500	5,21
2013	362 162	41 000	4,87
2014	381 400	40 600	4,80
2015	411 709	39 100	4,60
2016	426 527	37 030	4,33

Sumber: Survei Sosial ekonomi Nasional (SUSENAS), 2016

Tabel 5. Jumlah Keluarga Menurut Kecamatan dan Klasifikasi Keluarga di Kota Malang Tahun 2015

Kecamatan	Pra Sejahtera	Keluarga Sejahtera				Jumlah
		I	II	III	III+	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Kedungkandang	5004	9206	11939	15 868	7 061	49 078
2. Sukun	6813	8598	11576	14 743	5 034	46 755
3. Klojen	2003	6428	4916	9 127	4 359	26 833
4. Blimbing	3617	5109	9368	16 610	7 659	42 363
5. Lowokwaru	2537	5244	7895	16 758	6 716	39 150
Kota Malang	19 974	34 585	45 685	73 106	30 829	204 179

Sumber: Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Malang

Pada **Tabel 6 Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin Kota Malang Tahun 2012-2016** dilihat bahwa garis kemiskiskinan dari tahun ke tahun selalu naik dari angka 330 765 pada tahun 2012 sampai dengan 426 527 pada tahun 2016. Pada data mengenai kemiskinan ini dapat dilihat bahwa pemerintah Kota Malang telah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang telah membuahkan turunnya angka kemiskinan tiap tahunnya. Pada tahun 2012 yang mulanya angka kemiskinan mencapai 43 500 jiwa atau sekitar 5,21% diturunkan hingga menjadi 37 030 jiwa atau sekitar 4,33%. Dari Data ini menunjukkan perkembangan yang sangat baik tentang penanganan kemiskinan di Kota Malang. Selain dari data yang terdapat pada **tabel 6**, baiknya kinerja pemerintah tentang penurunan kemiskinan di Kota Malang juga didukung oleh data pada **Tabel 7 Jumlah Keluarga Menurut Kecamatan dan Klasifikasi**

Keluarga di Kota Malang Tahun 2015, tabel ini menunjukkan bahwa keluarga pra-sejahtera di Kota Malang berjumlah 19.974 keluarga. Yang mana jumlah keluarga ini tidak lebih banyak dari keluarga sejahtera I sampai dengan III+.

4.1.2 Gambaran Ekonomi Kota Malang

Pencapaian pemerintah Kota Malang dalam menurunkan angka kemiskinan tidak terlepas dari peran sektor ekonomi yang kian berkembang sehingga dapat menyerap tenaga kerja dan mengurangi angka kemiskinan di Kota Malang. Sampai dengan saat ini jumlah industri yang ada di Kota Malang mencapai 894 persahaan.¹. Melihat sektor ekonomi yang ada di Kota Malang juga dapat dilihat dari jumlah industri yang berdiri dan berjalan di Kota Malang. berikut adalah jumlah industri yang saat ini berdiri di Kota Malang:

¹ <https://disnaker.malangkota.go.id/database/data-perusahaan/> diakses pada 29 april 2018 jam 20.00 WIB

Tabel 6. Jumlah Industri Besar dan Sedang yang Aktif menurut Sub Sektor Industri di Kota Malang, 2016

Subsektor Industri	Kode Industri	Jumlah Perusahaan
Industri Makanan dan Minuman	10-11	25
Industri Pengolahan Tembakau	12	21
Industri Tekstil dan Industri Pakaian Jadi	13-14	19
Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas	15	4
Industri Kayu, Anyaman dan Industri	16-17	4
Industri penerbitan, percetakan & reproduksi media rekaman	18-19	16
Industri kimia dan barang dari kimia	20-21	7
Industri karet, barang dari karet dan barang dari plastic	22	10
Industri barang galian bukan logam	23-25	8
Industri Mesin, mesin listrik dan peralatan kedokteran, alat ukur, peralatan navigasi, optik, jam & lonceng	26-28	4
Industri kendaraan bermotor industri alat angkut, selain kendaraan bermotor roda 4 atau lebih	29-31	13
Industri furniture dan industri pengolahan Lainnya	32-42	10
Jumlah		141

Sumber : Survei Industri Besar dan Sedang, 2016

Tabel 7. Jumlah Indsutri Besar dan Sedang Yang Aktif Menurut Kecamatan di Kota Malang, 2016

Kecamatan	Jumlah Industri Besar dan Sedang
Kedungkandang	21
Sukun	47
Klojen	23
Blimbing	45
Lowokwaru	5
Jumlah	141

Sumber : Survei Industri Besar dan Sedang, 2016

Pada **tabel 8 dan tabel 9** menunjukkan jumlah industri berskala sedang dan besar sejumlah 141 industri. Jumlah 141 industri tersebut merupakan bagian dari 894 perusahaan yang tercatat oleh dinas ketenagakerjaan Kota Malang. Salah satu cara pemerintah guna menurunkan angka pengangguran di Kota Malang adalah dengan memanfaatkan jumlah tersebut. Dapat dilihat bahwa pada **tabel 8**, industry-industri yang paling banyak di Kota Malang adalah industri padat karya yang membutuhkan banyak tenaga kerja seperti pabrik pengolahan makanan dan minuman, pengolahan tembakau dan industri pengolahan tekstil. Selain, melihat masalah pengangguran yang ada di Kota Malang.

Dalam melihat keadaan Kota Malang juga perlu melihat perkembangan ekonomi kota itu sendiri. Hal ini dilakukan guna melihat sektor-sektor mana saja yang dinilai potensial yang ada Kota Malang. Dengan melihat sektor-sektor yang potensial yang ada di Kota Malang akan dapat menjadi acuan guna melihat kelebihan

dan kekurangan penyerapan tenaga kerja yang ada di Kota Malang. Cara paling sederhana guna melihat perkembangan perekonomian suatu kota adalah dengan melihat keadaan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Berikut adalah PDRB Kota Malang :



Tabel 8. Produk Domestik Regional Bruto Kota Malang Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2010-2016

Kategori	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015*	2016**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	101 982,6	103 920,9	104 137,8	103 161,2	105 082,5	107 427,4	107 515,2
B	Pertambangan dan Penggalian	44 348,5	43 417,2	42 254,5	40 548,7	39 791,5	38 367,0	36 225,2
C	Industri Pengolahan	9 051 866,6	9 295 437,6	9 553 589,3	9 737 974,2	10 011 650,2	10 263 381,3	10 463 340,7
D	Pengadaan Listrik dan Gas	12 735,4	13 773,6	15 183,8	15 425,1	16 078,3	16 076,5	16 836,2
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	68 320,0	71 858,9	75 187,0	81 384,8	83 900,6	87 012,8	91 297,2
F	Konstruksi	3 630 477,9	3 907 229,3	4 225 473,1	4 592 692,1	4 998 470,2	5 257 447,8	5 612 051,0
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9 353 673,9	10 055 739,4	10 819 659,8	11 586 292,6	12 221 546,3	13 022 699,0	13 844 817,3
H	Transportasi dan Pergudangan	750 958,1	790 815,5	849 816,1	912 178,3	977 545,7	1 044 323,0	1 122 291,3
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1 221 434,3	1 313 091,6	1 434 880,4	1 549 845,6	1 712 018,9	1 850 982,0	1 997 080,7
J	Informasi dan Komunikasi	1 272 008,6	1 379 824,0	1 522 395,8	1 704 436,0	1 843 103,8	1 993 053,2	2 174 187,9
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	735 248,4	792 779,9	866 774,5	976 990,6	1 042 606,7	1 116 992,7	1 205 068,2
L	Real Estate	437 751,0	471 168,9	507 912,3	545 746,5	585 329,5	627 783,5	674 328,3
M, N	Jasa Perusahaan	219 878,7	232 320,1	245 645,5	262 764,3	285 795,6	310 845,6	333 005,9
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	562 400,9	588 721,3	597 794,9	602 693,7	603 377,3	625 810,4	636 494,3
P	Jasa Pendidikan	2 176 272,5	2 342 052,3	2 510 565,3	2 730 421,8	2 957 346,0	3 203 129,9	3 456 841,4
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	645 212,1	734 700,4	812 722,5	887 332,7	967 805,9	1 064 148,1	1 152 126,5
R, S, T, U	Jasa Lainnya	1 092 765,9	1 136 818,8	1 171 749,3	1 217 850,8	1 273 251,7	1 322 646,1	1 380 393,6
PRODUK DOMESTIK BRUTO		31 377 335,7	33 273 669,8	35 355 741,9	37 547 738,8	39 724 700,9	41 952 126,2	44 303 901,0
PRODUK DOMESTIK BRUTO TANPA MIGAS		31 377 335,7	33 273 669,8	70 607 346,0	37 547 739,8	39 724 700,9	41 952 127,2	44 303 901,0

Sumber : BPS Kota Malang

Tabel 9. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kota Malang Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen), 2011-2016

Kategori	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015*	2016**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,90	0,21	-0,94	1,86	2,23	0,08
B	Pertambangan dan Penggalan	-2,10	-2,68	-4,04	-1,87	-3,58	-5,58
C	Industri Pengolahan	2,69	2,78	1,93	2,81	2,51	1,95
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8,15	10,24	1,59	4,23	-0,01	4,73
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,18	4,63	8,24	3,09	3,71	4,92
F	Konstruksi	7,62	8,15	8,69	8,84	5,18	6,74
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,51	7,60	7,09	5,48	6,56	6,31
H	Transportasi dan Pergudangan	5,31	7,46	7,34	7,17	6,83	7,47
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,50	9	8,01	10,46	8,12	7,89
J	Informasi dan Komunikasi	8,48	10,33	11,96	8,14	8,14	9,09
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,82	9,33	12,72	6,72	7,13	7,89
L	Real Estate	7,63	7,80	7,45	7,25	7,25	7,41
M, N	Jasa Perusahaan	5,66	5,74	6,97	8,77	8,77	7,13
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	4,68	1,54	0,82	0,11	3,72	1,71
P	Jasa Pendidikan	7,62	7,20	8,76	8,31	8,31	7,92
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	13,87	10,62	9,18	9,07	9,95	8,27
R, S, T, U	Jasa Lainnya	4,03	3,07	3,93	4,55	3,88	4,37
PRODUK DOMESTIK BRUTO		6,04	6,26	6,20	5,80	5,61	5,61
PRODUK DOMESTIK BRUTO TANPA MIGAS		6,04	6,26	6,20	5,80	5,61	5,61

Sumber : BPS Kota Malang

Pada **Tabel 10** dilihat bahwa sektor dengan PDRB paling tinggi adalah Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan angka PDRB mencapai Rp. 9 353 673,9 (dalam satuan juta) pada tahun 2010 dan terus berkembang hingga tahun 2016 angka PDRB pada sektor ini mencapai Rp. 13 844 817,3 (dalam satuan juta). Tahun 2010 hingga 2011 dapat dilihat pada **Tabel 11** sektor ini mengalami perkembangan sebanyak 7,51 %. Pada **Tabel 11** dapat dilihat bahwa hingga pada tahun 2016 jumlah total perkembangan PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor adalah mencapai 40,55 %. Angka pertumbuhan PDRB Kota Malang yang paling tinggi adalah pada sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial dengan total perkembangan dari tahun 2011 hingga 2016 mencapai 60,96 %.

Disisi lain penyumbang PDRB paling sedikit di Kota Malang dapat dilihat di Pada **Tabel 10** adalah pengadaan listrik dan gas, yang mana hanya sebanyak Rp. 12 735,4 (dalam satuan juta) dan tetap menjadi sektor penyumbang PDRB paling sedikit pada tahun 2016 yakni hanya berjumlah Rp. 16 836,2 (dalam satuan juta). Namun, Sektor dengan perkembangan PDRB paling lamban di Kota Malang, bahkan justru mengalami kemerosotan adalah sektor pertambangan dan penggalian yang mana dari tahun 2011 berjumlah Rp. 44 348,5 (dalam satuan juta) menjadi RP. 36 225,2 (dalam satuan juta). Jika dilihat pada **Tabel 11**, sektor pertambangan dan penggalian mengalami penurunan yang cukup drastis dari tahun 2011 hingga 2016 yang jika dijumlahkan dalam satuan persen menunjukkan angka kemerosotannya mencapai 19,85%.

4.2 Profil Pengangguran Kota Malang

Kota Malang dengan segudang permasalahan di dalamnya termasuk pengangguran sebagai salah satunya. Guna mengkaji masalah pengangguran yang tak kunjung usai, pertama-tama haruslah dijabarkan terlebih dahulu data-data mengenai pengangguran itu sendiri seperti usia pengangguran, jenis kelamin dan jenjang pendidikan yang paling banyak menjadi pengangguran.

Tujuan utama menguraikan data pengangguran bukan semata untuk memaparkan data mengenai pengangguran yang ada di Kota Malang tapi juga bertujuan untuk mencari inti permasalahan mengenai pengangguran dan pemecahannya. Sebagai contoh memaparkan pengangguran berdasarkan usia maka akan terlihat rentan usia yang paling banyak menganggur, dengan terlihatnya rentan usia pengangguran tersebut maka pemerintah dapat fokus dan memutuskan secara tepat kebijakan yang akan diambil. Contoh lain adalah mengenai perbedaan pengangguran berdasarkan jenis kelamin, pemecahan masalah mengenai pengangguran untuk laki-laki dan perempuan pasti lah berbeda hal ini terkait akan berbagai macam faktor.

Semua hal tersebut, yang menjadi dasar adalah tingkat kerentan yang berbeda seperti tingkat kerentanan usia 25-34 tahun tentu berbeda dengan mereka yang berusia lebih dari itu misalnya usia >56 tahun. Sama halnya dengan perbedaan jenis kelamin, laki-laki dan perempuan tentu memiliki kerentanan yang berbeda pula. Karena penting untuk menjabarkan pengangguran serinci mungkin. Melihat lebih jauh mengenai pengangguran di Kota Malang, berikut adalah tabel pengangguran di

Kota Malang dari tahun 2013 sampai dengan 2015 dan tabel pengangguran paling baru yakni tahun 2017 :



Tabel 10. Data Pengangguran Terkbuka Kota Malang Menurut Jenis Kelamin dan Usia pada Tahun 2013-2015

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Laki-laki dan Perempuan
2013	17.531	16.092	33.623
2014	15.642	15.119	30.581
2015	19.433	10.163	29.606
Jumlah	52.606	41.374	93810

Sumber: Ringkasan eksekutif Ketenagakerjaan Kota Malang 2015



Tabel 11. Data Pengangguran Terbuka Kota Malang Menurut Jenis Kelamin dan Usia pada Tahun 2017

No	Kecamatan	Usia														Total		
		10 sd 15		16 sd 24		25 sd 34		35 sd 44		45 sd 56		>56		Tidak ditulis		L	P	Jumlah
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P			
1	Kedungkandang	7	2	635	178	551	120	247	52	75	29	1	1	0	0	1516	382	1898
2	Lowokwaru	1	0	181	76	172	71	84	17	42	12	6	0	1	0	487	176	663
3	Blimbing	0	0	235	79	219	62	168	55	155	62	0	1	3	0	780	259	1039
4	Klojen	1	0	235	117	226	49	178	55	116	39	5	0	16	13	777	273	1050
5	Sukun	2	0	282	106	250	74	163	66	91	55	9	1	2	0	799	302	1101
Jumlah																4359	1392	5751

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kota Malang

Tabel 12. Data Pengangguran Terbuka Kota Malang Menurut Tingkat Pendidikan pada Tahun 2017

No	Kecamatan	Tingkat Pendidikan																				Total		
		SD		SLTP		SLTA		SMK		D1		D2		D3		D4/S1		S2		Tidak Tertulis		L	P	Jumlah
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P			
1	Kedungkandang	533	166	436	87	323	103	139	34	1	3	0	0	7	8	45	21	0	1	32	9	1516	382	1898
2	Lowokwaru	83	11	94	24	211	78	36	20	0	3	0	1	3	7	54	27	1	3	5	2	487	176	663
3	Blimbing	166	58	204	60	281	84	78	30	0	2	0	1	10	5	34	18	0	0	7	1	780	259	1039
4	Klojen	134	25	158	32	332	145	74	32	2	2	1	1	19	7	27	18	0	0	30	11	777	273	1050
5	Sukun	184	69	194	68	292	110	89	30	1	0	0	2	5	5	17	9	0	0	17	9	799	302	1101
		Jumlah																				4359	1392	5751

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kota Malang

Pada **tabel 12** dapat dilihat bahwa angka pengangguran pada tahun 2013-2015 terus mengalami penurunan. Dapat dilihat bahwa pada tahun 2013 adalah 33.623 kemudian pada tahun 2014 menjadi 30.581 dan masih terus turun pada tahun 2015 menjadi 29.606 pengangguran. Kemudian keberhasilan pemerintah Kota Malang tersebut masih terus berlanjut sampai dengan tahun 2017, angka pengangguran di Kota Malang turun sampai dengan angka 5751 pengangguran.

Pada **tabel 13** dapat dilihat jumlah pengangguran tiap kecamatan yang ada di Kota Malang. Kecamatan Pertama yang menjadi kantong pengangguran di Kota Malang adalah Kecamatan Kedungkandang dengan jumlah 1898 pengangguran. Kemudian kecamatan kedua dengan angka pengangguran tertinggi adalah Kecamatan Sukun dengan angka pengangguran mencapai 1101 pengangguran, lalu Kecamatan Klojen dengan angka pengangguran sebesar 1050 pengangguran, Kecamatan Blimbing dengan angka pengangguran 1039, dan terakhir kecamatan lowokwaru yang hanya terdapat 663 pengangguran. Pada **tabel 13** dapat dilihat bahwa mayoritas para pengangguran terbuka adalah kaum laki-laki, bahkan jumlah para pengangguran terbuka perempuan tidak sampai setengah dari jumlah pengangguran perempuan.

Kemudian berlanjut pada **tabel 14** dapat dilihat angka pengangguran tertinggi justru disumbangkan oleh mereka yang menempuh pendidikan SLTA/SMA dengan jumlah pengangguran mencapai 1769 orang pengangguran, jumlah ini jauh mengungguli mereka yang hanya menempuh pendidikan hingga SD yang hanya berjumlah 1429 pengangguran kemudian angka pengangguran tertinggi ketiga berdasarkan tingkat pendidikan adalah para pengangguran yang

menempuh pendidikan hanya sampai SMP yang berjumlah 1357 pengangguran. Hal menarik disini adalah mereka yang menempuh jalur pendidikan SMK jauh lebih sedikit menganggur dari pada mereka yang menempuh jalur pendidikan SLTP atau SMK yakni berjumlah 562 pengangguran.

Memang tidak banyak namun angka pengangguran juga masih terdapat pada tingkat lanjut yakni pada pendidikan D4/S1 yang berjumlah 270 pengangguran, kemudian D3 berjumlah 76 pengangguran, d1 berjumlah 18 pengangguran, D2 dengan 6 orang pengangguran, lalu S2 yang berjumlah 4 orang pengangguran dan terakhir yang tidak tercatat riwayat pendidikannya berjumlah 168 pengangguran.

Melihat dari **tabel 13 dan tabel 14** mengenai angka pengangguran terbuka di Kota Malang apabila dibandingkan dengan angka pengangguran dari tahun 2011-2015 yang mana pada Tahun 2011 angka pengangguran di Kota Malang sebesar 22.185 jiwa kemudian naik drastis pada tahun 2012 jumlah pengangguran mencapai 31.807 jiwa, jika di prosentasikan dalam tingkat pengangguran terbuka (TPT) kenaikannya mencapai 2,56 persen. Tentu hal ini, bukan masalah sepele yang dapat dibiarkan begitu saja karena jumlah pengangguran hanya dalam satu tahun melonjak begitu dratis. Pada tahun 2013 angka pengangguran perlahan terus mengalami penurunan menjadi 30.581 jiwa pada Tahun 2014 dan menjadi 29.606 jiwa pada Tahun 2015.² Dapat dilihat bahwa program serta kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah Kota Malang membuahkan hasil yang luar biasa dimana angka pengangguran turun dari angka 29.606 jiwa menjadi hanya 5751 jiwa saja atau turun 80,6% dari tahun 2015 sampai dengan 2017.

² <https://malangkota.bps.go.id/> diakses pada 12/8/2017 jam 5.20 WIB



BAB V

PEMBAHASAN

5.1 Strategi Pemerintah Menurunkan Angka Pengangguran di Kota Malang

Pengangguran ada berbagai macam, menimpa baik laki-laki maupun perempuan, baik segala umur maupun latar pendidikan serta menjadi sebuah fenomena yang bisa terjadi pada siapa saja di seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kota Malang. Pengangguran yang sangat tinggi akan menyebabkan berbagai permasalahan di perkotaan yang akan dapat mempengaruhi kondisi sosial serta ekonomi kota itu sendiri. Lapisan masyarakat yang paling rentan ketika terjadi permasalahan sosial dan ekonomi akibat angka pengangguran yang tinggi adalah mereka yang termasuk kedalam lapisan masyarakat miskin atau berekonomi lemah. Masyarakat miskin dalam kajian ketahanan Kota digolongkan dalam kategori masyarakat rentan. Masyarakat rentan sendiri merupakan masyarakat yang sangat mudah terdampak resiko-resiko perkotaan ataupun bencana. Karenanya masyarakat miskin harus dilindungi dengan berbagai macam program serta kebijakan. Strategi pemerintah yang didalamnya termuat program serta kebijakan guna menurunkan angka pengangguran yang pada akhirnya nanti dapat menyokong ketahanan kota yang akan melindungi masyarakat rentan, dalam penguplementasiannya haruslah tepat sasaran. Menurut Daniel Mazmanian dan Paul A.Sabatier setidaknya ada tiga faktor untuk melihat atau menganalisa implementasi sebuah kebijakan sebagai berikut:

a. Karakteristik Masalah

Guna Melihat karakteristik permasalahan, hal pertama yang harus dilakukan adalah menguraikan mengenai tingkat kesulitan permasalahan itu sendiri. Permasalahan mengenai pengangguran merupakan sebuah permasalahan yang sulit untuk di uraikan. Bahkan hal ini juga disebutkan oleh Daniel Marzmanian dan Paul A. Sabatier.

“.....Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan. Disatu pihak ada beberapa masalah sosial secara teknis mudah dipecahkan, seperti kekurangan persediaan air minum bagi penduduk atau harga beras yang tiba-tiba naik. Dipihak lain terdapat masalah-masalah sosial yang relatif sulit dipecahkan seperti kemiskinan, pengangguran, korupsi, dan sebagainya.”

Hal pertama, guna menguraikan permasalahan mengenai pengangguran adalah dengan melihat akar dari permasalahan tersebut. Akar dari tingginya angka pengangguran sendiri baik di Kota Malang atau di manapun itu adalah kurangnya lapangan pekerjaan yang memadai untuk menampung jumlah tenaga kerja yang ada. Selain itu ada juga berbagai macam faktor yang menyebabkan pengangguran yang dapat diidentifikasi menurut jenisnya. Secara sederhana jenis-jenis pengangguran yang dapat diidentifikasi dari penyebabnya adalah sebagai berikut:

1. Pengangguran friksional : karena urbanisasi atau kepindahan ke daerah lain sehingga harus berganti dan mencari pekerjaan lain,
2. Pengangguran Musiman : diakrenakan keadaan iklim dan musim,
3. Pengangguran Siklis : dikarenakan perubahan keadaan ekonomi yang mengalami kemunduran,
4. Pengangguran

Struktural : dikarenakan pencari kerja tidak dapat memenuhi persyaratan kerja yang ada (mendasar).

Membicarakan mengenai penyebab tingginya angka pengangguran di Kota Malang, menurut Drs. Hendro Suyoto, MM (Kepala seksi Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Malang) ada dua hal yang turut menyumbang tingginya angka pengangguran yang diuraikan pada hasil wawancara di bawah ini:

“.....Pengangguran di Kota Malang sendiri pada umumnya dari tiap tahunnya di karenakan dua hal yaitu urbanisasi dan karena musim. Tapi yang paling banyak ini yah musim. Kan bisa dilihat di data pengangguran di Kota Malang ini pengangguran yang paling tinggi dari kecamatan kedungkandang. Sebabnya yah karena mayoritas penduduk disini mata pencahariannya bertani”

Hal yang diungkapkan diatas selaras dengan **tabel 13** menunjukkan angka pengangguran tertinggi terdapat di Kecamatan Kedungkandang. Selain karena keadaan musim yang berganti, Kota Malang yang notabennya adalah Kota dengan berbagai macam daya Tarik baik dari segi wisata mau pun pendidikan membuat banyak orang berdatangan dari berbagai macam daerah untuk dapat mengadu nasib di Kota Malang. Jika dua hal yang tadi yang menjadi penyumbang utama angka pengangguran menurut Drs. Hendro Suyoto, MM (Kepala seksi Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Malang) maka berbeda lagi penyebab pengangguran yang ada di Kota Malang menurut Indras Sri Citowati, Sp, MM (selaku Kepala Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Balita dan Anak Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Dinas

Sosial Kota Malang) yang mana dalam wawancara menyiratkan bahwa tuntutan persyaratan mendapatkan pekerjaan kian ketat tiap tahunnya. Seperti yang dikatakan oleh beliau sebagai berikut:

“.....kalau ngomong masalah pengentasan pengangguran Dinas Sosial ini juga kan punya program-program pemberdayaan masyarakat untuk mendirikan usaha sendiri. Hal itu dilakukan juga sebagai upaya memandirikan mereka. Karena masyarakat lemah di Kota Malang ini jarang yang mau memperkejakan. Banyak faktornya, salah satunya yah masalah pendidikan. Itu masih untuk orang-orang normal saja sulit dapat pekerjaan, apa lagi saudara-saudara kita yang disabilitas mas. Karena itu, banyak dari program pemberdayaan Dinas Sosial Kota Malang ini berfokus untuk membantu orang-orang tersebut agar bisa mendirikan usaha sendiri. Agar tidak bergantung dan berharap mendapatkan pekerjaan.”

Hal yang digetirkan oleh Indras Sri Citowati, Sp, MM (selaku Kepala Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Balita dan Anak Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Dinas Sosial Kota Malang) memanglah hal yang nyata ada di Kota Malang. Karena hal ini juga turut di amini oleh para pelaku usaha dalam merekrut karyawan yang ada. Hal tersebut diungkapkan oleh Eric Kusuma Hadi selaku staff divisi *public relation* PT. Bentoel Distribusi Utama (identias disamarkan) sebagai berikut:

“.....Jadi begini mas, perusahaan itu kan punya Visi dan Misi serta “Ambisi” kalau kualitas SDM dari tahun ke ke tahun tetap sama maka perusahaan tidak akan berkembang mas, persuahan akan jalan ditempat

karena yah orangnya atau SDMnya yah gitu-gitu aja juga. Kalau sudah seperti itu, visi misi yang ada bisa-bisa tidak akan berjalan kedepan mas, bisa-bisa malah mundur. ”

Seperti yang telah disebutkan diatas alasan paling mendasar terus ditingkatkannya standar dalam perekrutan tenaga kerja adalah seperti diatas. Dan hal ini memang terjadi, apabila pelaku usaha ingin terus berkembang. Karena faktanya apabila *recruitment* tenaga malah dikendorkan dampaknya adalah pada perusahaan itu sendiri. Hal tersebut lah yang terjadi pada seorang pelaku usaha di bidang konfeksi yang ada di Kota Malang bernama mas ilyas. Yang mana meski pun beliau mendapat bantuan serta pelatihan dari Disnaker, usahanya mengalami kemunduran. Dari berbagai wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepadanya dapat ditarik satu kesimpulan bahwa setelah usahanya berkembang tapi *recruitment* pegawai yang dilakukan oleh mas ilyas ini sama sekali tidak berkembang. Sehingga dampaknya ketika awal usahanya berkembang beliau dapat merekrut 5 karyawan tambahan namun karena SDM yang di rekrut hanya pada takaran yang sama sedangkan kondisi perusahaannya terus berkembang dan permintaan pun terus berdatangan akhirnya hal tersebut malah menjadi bomereang bagi perusahaan *home industry* nya yang menyebabkan perusahaannya harus melakukan pemecatan pada 5 karyawannya dalam perjalanannya selama beberapa bulan guna menutupi kerugian serta menata kembali menejerial yang sudah kacau.

Hal diatas menjelaskan bahwa permasalahan mengenai penangangguran sangatlah pelik. Seperti sebuah boomerang, salah mengambil keputusan akan berakibat menjadi sebuah permasalahan di kemudian hari. Hal ini tidak hanya berlaku pada takaran sektor swasta tapi juga bagi pemerintah.

b. Karakteristik Kebijakan

Kota Malang dengan begitu runyamnya permasalahan mengenai pengangguran mengharuskan pemerintah kota memiliki strategi tepat sasaran guna dapat mengatasi hal ini. Strategi yang dijalankan pemerintah Kota Malang untuk menurunkan pengangguran adalah program-program yang berbasis pada masyarakat. Hal ini tentu bukan tanpa alasan, alasan paling mendasar adalah karena permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Kota Malang tentang pengangguran haruslah dapat menyokong ketahanan kota guna melindungi masyarakat yang ada didalamnya terutama golongan masyarakat-masyarakat lemah.

Program dan kebijakan berbasis pada masyarakat dapat diartikan sebagai sebuah program dan kebijakan yang melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya. Tujuan digunakannya program dan kebijakan pengentasan pengangguran yang berdasarkan masyarakat ini adalah membangun lingkungan atau situasi masyarakat yang saling mendukung antar individunya agar sadar akan peningkatan kualitas hidupnya. Hal ini pula yang disampaikan oleh Bu Indras Sri Citowati, Sp, MM. selaku Kepala Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Balita dan Anak Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Dinas Sosial Kota Malang.¹

“.....Orang-orang yang bekerja dijalanan seperti pengemis, anak-anak punk yang mengamen dan lain sebagainya itu harus diberikan pengertian bahwa pekerjaan yang dilakukan itu merupakan bukanlah pekerjaan yang layak bagi mereka yang masih mampu untuk melakukan

¹ Wawancara penelitian dengan Bu Indras Sri Citowati, Sp, MM. selaku Kepala Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Balita dan Anak Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Dinas Sosial Kota Malang pada tanggal 23 Januari 2018.

pekerjaan lain. Mereka harus disadarkan bahwa mendapatkan uang yang sedikit dengan bekerja keras itu lebih baik dari pada mendapatkan uang yang banyak tanpa melakukan apa-apa. Namun, kebijakan dan program apa pun yang dilakukan pemerintah tidak akan pernah berhasil memperbaiki keadaan dan pola pikir mereka apabila tidak ada dukungan dari masyarakat sekitar. Karena itu pemerintah Kota Malang melalui Dinas Sosial membuat program-program yang berbasis masyarakat guna dapat membantu para kaum lemah ini.”

Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Sosial dan Dinas Ketenagakerjaan utamanya membuat program-program baik itu berbasis masyarakat dan lain sebagainya guna menghadapi masalah pengangguran yang tak kunjung usai di Kota Malang.

Melihat lebih jauh tentang keadaan dan situasi di Kota Malang mengenai pengangguran, sesungguhnya Pemerintah Kota Malang memiliki 2 program untuk mengatasinya yakni program pengentasan pengangguran untuk masyarakat lemah (para masyarakat berekonomi lemah, penyandang disabilitas dll) dan program pengentasan pengangguran untuk masyarakat biasa.

Hal ini dapat dilihat dari beberapa program yang dimiliki Kota Malang yang dilaksanakan melalui Dinas Sosial dan Dinas Ketenagakerjaan. Program-program yang dimiliki pemerintah Kota Malang dalam menangani pengangguran bukan hanya program yang semata hanya bertujuan untuk menekan angka pengangguran tapi juga mempertimbangkan dari segi ketahanan kota, yang artinya program-program pengentasan pengangguran dan peningkatan kesejahteraan yang

dilakukan pemerintah Kota Malang juga turut menyokong ketahanan yang dimiliki kota itu sendiri.

Pemerintah Kota Malang sebagai penyelenggaraan pemerintahan dan pengatur masyarakat memiliki peran vital untuk kesejahteraan masyarakat. Pemerintah memiliki kewajiban dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang diaturnya. Dalam hal ini, menurunkan angka pengangguran berarti membantu masyarakat yang menganggur dan tidak memiliki pendapatan jadi memiliki pekerjaan dan memiliki pendapatan. Sedang menurunkan angka pengangguran dalam kajian ketahanan kota berarti pemerintah membuat kebijakan dan program guna menurunkan angka pengangguran namun juga harus berdampak pada aspek pemerintahan yang lainnya utamanya pada masyarakat itu sendiri secara berkelanjutan sehingga tercipta ketahanan yang baik di Kota Malang.

Pemerintah Kota Malang memegang peran *central* karena dalam hal ini pemerintah bertindak sebagai pengatur regulasi, penaung, sponsor sekaligus sering kali sebagai pelaksana program-program yang berkaitan dengan ketahanan kota. Pemerintah Kota Malang sendiri melalui Dinas Sosial dan Dinas Ketenakerjaan memiliki program-program untuk menekan angka pengangguran guna menyokong ketahanan kota seperti berikut:

Program Dinas Sosial² :

- Rehabilitasi Sosial (Program Desaku Menanti, Pelatihan Keterampilan atau *Life Skill* Kepada Para Penyandang Disabilitas)

² Wawancara penelitian dengan Bu Indras Sri Citowati, Sp, MM. selaku Kepala Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Balita dan Anak Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Dinas Sosial Kota Malang pada tanggal 23 Januari 2018.

- Program Keluarga Harapan
- Pelatihan Kerja / Keterampilan
- Pembinaan Terhadap PMKS (pemulung, pengemis, dan gelandangan)
- Pemberdayaan warga miskin

Program Dinas Ketenagakerjaan³ :

- Job Market Fair
- Pelatihan Kerja / Keterampilan
- Pembinaan Kelembagaan (pelatihan menejerial)
- Mengembangkan Wirausaha Baru
- Program Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), Antar Kerja Lokal (AKL), dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN)

Program-program yang disebutkan diatas hanya beberapa program yang dimiliki pemerintah Kota Malang melalui Dinas-dinas yang terkait ketahanan kota utamanya mengenai pengangguran.

Lebih jauh lagi melihat kebijakan serta program yang dimiliki pemerintah Kota Malang guna dapat menyokong ketahanan Kota, dapat dilihat pada program “desaku menanti”. Program desaku menanti di Kota Malang terletak di Kecamatan Kedungkandang dan telah dimulai sejak bulan november 2016. Program desaku menanti merupakan program Kementrian Sosial Republik Indonesia melalui Dirjen Rehabilitasi Sosial, tepatnya Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang (RSTSKPO), melakukan upaya yang berkesinambungan guna mengentaskan gelandangan dan pengemis

³ Wawancara penelitian dengan bapak Drs. Hendro Suyoto, MM selaku Kepala seksi Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Malang pada tanggal 2 Febuari 2018.

(Gepeng) yang merupakan bagian dari penyumbang angka pengangguran di Kota Malang. Salah satu upaya guna membantu para pengangguran yang dulunya gelandangan dan pengemis tersebut adalah dengan memberdayakannya melalui program Desaku Menanti.

Kementrian Sosial bekerjasama dengan pemerintah Kota Malang khususnya Dinas sosial guna mewujudkan program ini di Kota Malang agar para pengangguran yang dulunya gelandangan dan pengemis mendapatkan kehidupan yang lebih layak sesuai dengan **UUD 1945 pasal 27 ayat 2 UUD 1945**, setiap warga negara berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak, dan mengusahakan suatu usaha untuk mencapai tujuan tersebut. Karena itulah, selain diberikan rumah layak, mereka juga diberikan *Vocational Training* serta program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) atau kelompok usaha bersama yang diharapkan agar mereka memiliki sumber income sendiri.

Program desaku menanti yang ada di Kota Malang kini telah berkembang menjadi sebuah desa wisata yang bernama Kampung Topeng yang terletak di dusun Baran Kecamatan Kedungkandang dan telah diresmikan pada 14 febuari 2017. Karena kini Program Desaku menanti telah berkembang menjadi wisata kampung topeng maka usaha ekonomi produktif yang digeluti warga desaku menanti diantaranya adalah usaha membuat topeng, dari mulai gantungan kunci sampai untuk hiasan dinding. Selain hal itu, kini kampung yang telah menjadi wisata tersebut juga juga tersedia kios-kios jajanan milik warga yang dibuka karena melihat adanya kesempatan untuk meningkatkan perekonomian.

Dijadikannya Kampung Topeng sebagai sebuah kawasan wisata tentunya hal ini juga mendukung **“Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 tahun**

2010 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan” yang mana dalam Perda ini diatur dalam **Pasal 4 poin ke-4** bahwa salah satu tujuan diselenggarakannya kepariwisataan adalah untuk mengurangi angka pengangguran. Hal ini telah terbukti dengan berjalannya program “desaku menanti” telah mengurangi para pengangguran yang dulunya adalah gelandangan dan pengemis yang tidak produktif kini telah berubah menjadi individu-individu yang produktif.

Gambar 1. Potret Kampung Topeng



Sumber: Dokumentasi Penelitian

Gambar 2. Potret Kampung



Sumber: Dokumentasi Penelitian

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa program desaku menanti ini merupakan rehabilitasi mantan gelandangan dan pengemis yang dulunya merupakan pengangguran jadi kembali produktif. Mereka diberikan pendidikan, pelatihan, serta modal awal untuk memulai usaha dengan perjanjian tidak diperbolehkan lagi melakukan aktifitas dijalanan.

Program Desaku Menanti ini telah menunjukkan pemerintah Kota Malang melakukan pemrograman tingkat masyarakat. Masyarakat di desa wisata kampung topeng diberikan pembinaan, pelatihan serta pendampingan agar mengerti bahwa mencari sumber ekonomi dengan bekerja keras itu lebih baik. Berjalannya program ini tentu akan merubah *mindset* individu-individu didalamnya yang sebelumnya adalah gelandangan dan pengemis dengan pola berfikis duduk bermalas-malasan dan mendapat uang menjadi mendapatkan uang dengan bekerja keras

Pada bagian ini, menjelaskan satu bagian penting guna membangun ketahanan kota adalah membangun masyarakat yang mampu menangani dan beradaptasi terhadap bencana. Dengan dijalankannya program “desaku menanti”, pemerintah Kota Malang telah membangun masyarakat yang mampu menangani dan beradaptasi terhadap bencana yang artinya pemerintah telah membangun manajemen resiko bencana berbasis masyarakat dan resiko bencana dalam hal ini adalah pengangguran.

Selain itu, Pemerintah Kota Malang secara langsung melalaui Dinas Sosial serta Dinas Ketenagakerjaan memiliki program langsung guna mengatasi masalah pengangguran Pemerintah Kota Malang. Dinas Sosial memiliki berbagai macam

program karena Dinas Sosial dalam pendekatannya memberikan klasifikasi yang berbeda-beda disesuaikan dengan kerentanan yang dimiliki masyarakat yang diberikan pelatihan. Sebagai contoh pelatihan kerja atau keterampilan yang diberikan kepada masyarakat miskin biasa tentu berbeda dengan pelatihan kerja atau keterampilan yang diberikan kepada para penyandang disabilitas. Hal ini diungkapkan pula oleh Bu Indras Sri Citowati, Sp, MM. selaku Kepala Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Balita dan Anak Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Dinas Sosial Kota Malang.⁴

“.....Saudara-saudra kita yang menyandang disabilitas tentu memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus yang tidak bisa disamakan dengan orang normal pada umumnya. Selain itu, penyandang disabilitas itu kan bermacam-macam sehingga pelatihan yang diberikan harus disesuaikan juga dengan kebutuhan mereka dan sama sekali tidak bisa disamakan satu sama lain.”

Memberdayakan kaum disabilitas bukan hanya sekedar membantu mencukupi kebutuhan mereka namun juga harus membantu para penyandang disabilitas ini dapat mandiri dan menjadi individu yang produktif sehingga tidak hanya dibantu tapi juga turut membantu pemerintah guna menurunkan angka pengangguran di Kota Malang. Hal ini juga telah diatur didalam **“Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas”**. Pada **Pasal 1 poin ke-15** disebutkan bahwa:

⁴ Wawancara penelitian dengan Bu Indras Sri Citowati, Sp, MM. selaku Kepala Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Balita dan Anak Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Dinas Sosial Kota Malang pada tanggal 23 Januari 2018.

“.....Pemberdayaan penyandang disabilitas adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan penyandang disabilitas yang mengalami ketidaksetaraan dalam masyarakat agar mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.”

Guna merealisasikan **Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas**, pemerintah giat memberikan pelatihan kerja dan pelatihan keterampilan. Pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial ini ada berbagai macam bukan hanya terbatas pada saudara-saudara penyandang disabilitas. Peserta yang telah diberikan pelatihan kerja atau keterampilan tidak hanya diberikan pelatihan tapi juga dibekali modal untuk memulai sebuah usaha namun perlu digaris bawahi bahwa modal yang diberikan untuk memulai usaha bukan lah berupa uang namun berupa alat-alat produksi. Alasan paling mendasar dibuatnya kebijakan memberikan modal usaha berupa alat produksi adalah agar peserta pelatihan menjadi produktif dan agar mencegah disalahgunakannya modal yang diberikan.

Dinas Ketenagakerjaan juga memiliki proyek pendekatan berbasis komunitas sehingga proyek ini tidak hanya dilakukan oleh satu dinas di Kota Malang. Hal yang membedakan pendekatan yang dilakukan Dinas Ketenagakerjaan adalah sasarannya. Apabila Dinas Sosial sosial menyasar pada masyarakat miskin untuk bisa diberdayakan sedangkan sasaran Dinas Ketenagakerjaan adalah mereka yang telah memiliki embrio usaha atau yang menunjukkan perkembangan yang paling menonjol setelah diberikan pelatihan. Sehingga tidak keseluruhan peserta pelatihan yang diberikan modal untuk mengembangkan usaha. Selain itu, Dinas Ketenagakerjaan Kota Malang juga

memberikan pembinaan kelembagaan atau bisa disebut sebagai pelatihan manajerial yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang kelembagaan pada para pemilik usaha agar semakin berkembang. Hal-hal ini disampaikan pula oleh Drs. Hendro Suyoto, MM selaku Kepala Seksi Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja.⁵

“.....Kami memang menyasar orang-orang yang sudah memiliki embrio usaha atau usahanya sedang berkembang. Hal ini untuk mengefektifkan program yang ada, karena dengan membantu usaha yang sedang berkembang akan lebih cepat dan berdampak lebih banyak memberikan dampak dalam hal penyerapan tenaga kerja dibandingkan memberi bantuan pada usaha yang baru berjalan”

Memberikan pelatihan-pelatihan guna mendukung pemerintah Kota Malang menurunkan angka pengangguran merupakan salah satu tugas utama Dinas Ketenagakerjaan Kota Malang selaku dinas yang bertanggung jawab langsung mengenai ketenagakerjaan di Kota Malang. Hal tersebut pun telah diatur didalam **“Pertaturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja”**.

Seperti yang telah dijabarkan diatas bahwa pemerintah Kota Malang sangat berperan aktif dalam hal pemberantasan pengangguran yang ada diberbagai lapisan masyarakat di Kota Malang. Pemerintah sebagai perancang sistem ketahanan, guna menyokong ketahanan kota yang berbasis masyarakat harus terus berperan aktif untuk meningkatkan ketahanan terhadap pengangguran dengan

⁵ Wawancara penelitian dengan bapak Drs. Hendro Suyoto, MM selaku Kepala seksi Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Malang pada tanggal 2 Febuari 2018.

memanfaatkan berbagai elemen yang ada di kota itu sendiri. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memperkuat pondasi-pondasi ketahanan melalui kerjasama pada bidang-bidang dibawah ini⁶ :

1. Kontinuitas Bisnis dan Ekonomi
2. Membangun Lingkungan
3. Kesiapan Menghadapi Bencana dan Peringatan Dini
4. Manusia dan Kapasitas Sosial

Keempat hal diatas dilakukan pemerintah Kota Malang melalui Dinas Sosial membantu para pengangguran yang tergolong kedalam kalangan masyarakat berkecukupan rendah atau masyarakat rentan guna dapat memiliki pekerjaan atau kembali menjadi individu yang produktif. Hal ini dilakukan dengan memberikan pelatihan yang kemudian berlanjut dengan pemberian modal berupa alat produksi. Tidak berhenti sampai disana, pemerintah Kota Malang juga membantu untuk memasarkan produk hasil produksi para peserta pelatihan. Langkah-langkah yang diambil oleh Dinas Sosial Kota Malang adalah dengan menyediakan *showroom* yang khusus berisi produk-produk buatan peserta pelatihan dan disamping itu Dinas Sosial juga menyelenggarakan dan mengikutsertakan pameran-pameran tentang kerajinan. Hal ini dilakukan guna menjamin keberlangsungan bisnis atau produktifitas para peserta-peserta yang mengikuti pelatihan. Jika dilihat dari sudut pandang lain, hal ini juga merupakan suatu perlindungan yang diwujudkan dalam bentuk keberlangsungan usaha yang mana usaha ini adalah sebuah sumber penghidupan para peserta yang merupakan masyarakat yang rentan terkena dampak bencana.

⁶ Jha, Abhas K., Todd W. Miner, Suzana Stanton-Geddes (eds.) (2013), *Building Urban Resilience : Principle, tools and practice*, Washington DC : The World Bank hlm. 95-96

Gambar 3. Potret Showroom Dinas Sosial



Sumber: Dokumentasi Peneliti

Gambar 4. Potret Showroom Dinas Sosial



Sumber: Dokumentasi Penelitian

Selain Dinas Sosial, pemerintah Kota Malang melalui Dinas Ketenagakerjaan juga turut bergerak guna menjamin kontinuitas bisnis atau memberikan perlindungan untuk usaha-usaha kecil yang ada di Kota Malang. Hal ini dilakukan Dinas Ketenagakerjaan melalui pelatihan-pelatihan manajerial (memberikan pendidikan mengenai manajemen yang baik dan benar), hal ini dilakukan untuk agar sebuah usaha dapat terus berjalan.

Terhambatnya atau bangkrutnya sebuah usaha di Kota Malang tentu akan berdampak langsung dengan jumlah pengangguran yang ada. Guna mencegah naiknya angka pengangguran pemerintah Kota Malang melalui dinas-dinasnya telah berperan aktif guna mencegah hal tersebut dengan menjamin atau setidaknya berusaha memberikan perlindungan terhadap kontinuitas bisnis dan ekonomi yang tengah berkembang saat ini.

Selain hal-hal diatas pemerintah Kota Malang juga turut menyertakan penduduk rentan dan terpinggirkan guna menyokong ketahanan kota dari bahaya pengangguran. Hal ini selaras dengan konsep tehanan kota yang mana juga turut menyertakan penduduk rentan dan terpinggirkan. Menyertakan masyarakat rentan dan terpinggirkan dilakukan pemerintah Kota Malang melalui dinas-dinasnya. Melalui Dinas Sosial beberapa waktu ini membantu memberdayakan para golongan masyarakat lemah seperti penyandang disabilas, kaum miskin dan lain sebagainya yang ada di Kota Malang. Meringkas dari hal-hal yang telah dijabarkan sebelumnya, pemerintah Kota Malang melalui Dinas Sosial membantu memberdayakan para pengangguran melalui program-programnya yakni yang pertama dalam pelatihan kerja, usaha atau keterampilan yang dapat digunakan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Kemudian setelah diberikan keterampilan para peserta yang merupakan pengangguran tidak dibiarkan begitu saja. Dinas Sosial membantu menyediakan modal berupa alat-alat produksi kedapa para peserta yang mengikuti pelatihan agar dapat segera berproduksi. Setelah dapat berproduksi Dinas Sosial Kota Malang juga turut serta membantu mecarikan pasar untuk memasarkan barang yang telah diproduksi.

Dinas Sosial Kota Malang menyediakan sebuah *show room* khusus yang menampilkan hasil-hasil produksi yang telah dibuat oleh para peserta pelatihan guna membantu memasarkan produk mereka. Selain *show room* ini, Dinas Sosial juga turut serta dalam pameran-pameran kerajinan untuk memperluas jangkauan pemasaran produk-produk hasil kerajinan yang telah dibuat oleh para peserta pelatihan.

Selain hal-hal diatas, Dinas Sosial Kota Malang juga turut membantu para penyandang disabilitas guna menjadi individu yang produktif. Salah satu caranya adalah menyalurkan tenaga mereka kepada lembaga khusus yang telah bekerja sama dengan Dinas Sosial untuk mempekerjakan pada penyandang disabilitas yang telah terlatih. Namun tentunya perlu digaris bawahi bahwasanya tidak semua pekerjaan dapat dilakukan oleh para penyandang disabilitas sehingga pekerjaan yang diberikan kepada para penyandang disabilitas ini sangat dipilah-pilah sehingga tidak menimbulkan beban bagi semua pihak.

Penyandang disabilitas ini tentunya bermacam-macam dengan berbagai perbedaan yang ada. Sehingga pekerjaan yang disediakan untuk menyalurkan para penyandang disabilitas ini pun di klasifikasikan sesuai dengan keadaan masing-masing individu penyandang disabilitas. Pekerjaan yang diklasifikasikan dan dibedakan oleh Dinas Sosial ini berdasarkan “keunikkan” yang dimiliki oleh para setiap penyandang disabilitas. Sebagai contoh yang sudah umum saat ini adalah dipekerjakannya para penyandang tuna netra untuk memijat. Di Kota Malang sendiri sudah banyak berdiri panti-panti pijat tuna netra. Tentunya hal ini juga merupakan turut campur tangan Dinas Sosial Kota Malang. Pekerja-pekerja tuna netra yang ada di panti-panti pijat tersebut merupakan individu-individu yang

disalurkan melalui Dinas Sosial, yang sebelumnya telah diberikan pelatihan dan keterampilan khusus untuk memijat.

Lebih jauh lagi melihat Kota Malang dalam hal mengikutsertakan atau berpartisipasi penduduk yang rentan dan terpinggirkan adalah pada program desaku menanti. Program desaku menanti sendiri merupakan sebuah program untuk merelokasi, memberikan tempat tinggal, mendidik serta melatih para mantan gelandangan dan pengemis yang dulunya merupakan salah satu lapisan masyarakat yang turut menyumbang angka pengangguran yang ada di Kota Malang. Para mantan gelandangan dan pengemis dipindahkan pada satu tempat serta diberikan tempat tinggal. Tujuannya tentu tidak lain dan tidak bukan adalah agar pemerintah mudah dalam mengontrol para mantan pengemis dan gelandangan ini. Program desaku menanti yang ada di Kota Malang atau sekarang yang telah berkembang menjadi desa wisata kampung topeng ini tidak hanya sekedar memindahkan dan memberi tempat tinggal pada para mantan gelandangan dan pengemis tapi juga para mantan gelandangan dan pengemis yang ada di desa ini diberikan pelatihan kerja dan usaha agar menjadi individu-individu yang kembali produktif dan tidak kembali menganggur seperti dahulu.

Kegiatan-kegiatan pelatihan yang berikan oleh Dinas Sosial Kota Malang dapat menjadi sebuah rehabilitasi sosial untuk memulihkan rasa percaya diri, pola pikir serta kemampuan berproduksi para pengangguran yang dulunya adalah mantan gelandangan dan pengemis. Sehingga para mereka dapat kembali bermasyarakat seperti semestinya dan hal tersebut juga akan berdampak pada ketahanan yang ada di Kota Malang karena kaum-kaum yang terpinggirkan ini dapat terlindungi dengan memanfaatkan kemampuan penduduk itu sendiri.

Pemerintah memiliki beberapa kebijakan selain hal-hal yang telah disebutkan diatas guna menurunkan angka pengangguran. Kebijakan tersebut adalah **“Kredit Usaha Rakyat”** melalui kebijakan ini masyarakat dapat mengajukan pinjaman kepada pemerintah melaui 3 bank BUMN. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah sebuah program prioritas guna mendukung kebijakan pemberian kredit/pembiayaan kepada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dengan memanfaatkan kebijakan pemerintah ini masyarkat yang ingin mengembangkan usaha yang telah berjalan menjadi lebih mudah. Dengan berkembangnya suatu usaha tentu akan membuat penyerapan tenaga kerja semakin banyak. Usaha mikro kecil mengengah atau disingkat UMKM juga merupakan salah satu solusi untuk mengurangi ketimpangan maupun kesenjangan pendapatan masyarakat Indonesia, karena sektor ini mempunyai ketahanan ekonomi yang tinggi. Hal ini yang mendorong pemerintah untuk terus menciptakan dan mendukung program pemberdayaan ekonomi berbasis kerakyatan.⁷

Guna menurunkan angka pengangguran kebijakan **“Kredit Usaha Rakyat”** saja tidak akan cukup. Pemerintah mendukung program lain guna menurunkan angka pegnangguran yakni melalui kebijakan pemerintah guna mengirim tenaga kerja Indonesia ke Luar Negeri. Hal ini diatur dalam **“Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri”**. Melalui Kebijakan ini Pemerintah dapat menekan angka pengangguran sacara langsung dengan mengirim tenaga kerja yang ada ke luar negeri dengan disesuaikan kebutuhan permintaan yang datang dari luar

⁷ <http://kur.ekon.go.id/gambaran-umum> dikutip pada 8/5/2018 jam 14.10

negeri. Tentunya sebelum mengirim tenaga kerja ke luar negeri para calon tenaga kerja tersebut dibekali pengetahuan guna dapat bekerja diluar sana. Hal ini juga telah dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Malang melalui program **“Antar Kerja Antar Negara”**. Sampai dengan saat ini program pemerintah mengirim tenaga kerja keluar negeri telah berkembang begitu pesat hingga kemudian akhirnya pemerintah menggandeng sektor swasta guna memajukan dan melancarkan kebijakan ini.

Selain hal-hal diatas guna menurunkan angka pengangguran sehingga dapat menyokong ketahanan yang dimiliki Kota Malang, strategi yang diterapkan guna menurunkan angka pengangguran harus bersinergi dengan *stakeholder* yang ada di Kota Malang. Hal ini dilakukan guna mewujudkan sebuah ketahanan yang kokoh. *Stakeholder* lain yang maksud dalam konsep ketahanan disini adalah pihak NGO/LSM dan Sektor Swasta. Angka pengangguran yang sangat tinggi merupakan sebuah ancaman bagi stabilitas dan perkembangan kota pada bidang sosial dan ekonomi karenanya dibutuhkan ketahanan kota, yang mana hal tersebut dilakukan melalui kebijakan dan program-program pemerintah yang bersinergi dengan NGO/LSM serta sektor swasta yang ada di Kota Malang.

Pemerintah Kota Malang menjalin kerjasama-kerjasama dengan pihak NGO atau pun sektor swasta sebagai bagian *stakeholder* guna membangun ketahanan yang kokoh untuk mencegah melebar nya masalah pengangguran. Membangun sebuah ketahanan kota yang kokoh diperlukan kerjasama yang berkelanjutan antara pemerintah, NGO dan sektor swasta dan dalam hal ini pemerintah berperan sebagai pihak *central* yang mengatur semuanya.

Di Kota Malang sendiri pemerintah Kota Malang telah membangun kerjasama dengan pihak NGO dan pihak swasta baik kerjasama itu bersifat langsung maupun tidak langsung.

Kerjasama yang dilakukan pemerintah Kota Malang bersama dengan LSM dan *NGO* salah satunya adalah membantu untuk mencari dan memberikan sponsor guna berjalannya perlindungan pada para pengangguran yang tergolong dalam masyarakat yang rentan. Selain itu, pihak LSM dan NGO di Kota Malang juga membantu pemerintah guna menampung, memberikan tempat tinggal serta memberikan rehabilitasi pada para pengangguran yang tergolong dalam masyarakat yang memiliki tingkat kerentanan sangat tinggi seperti penyandang disabilitas, anak-anak terlantar atau lansia terlantar.

Berjalannya kerjasama antara pemerintah dan NGO/LSM di Kota Malang duna memberikan perlindungan kepada para pengangguran yang tergolong dalam masyarakat lemah turut mendukung **“Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Pasal 2 dan Pasal 7”**. Diatur disini bahwa pemerintah memberikan rehabilitasi, pendidikan, pemberdayaan, ketenagakerjaan dan lain sebagainya. Hal ini diwujudkan oleh pemerintah Kota Malang melalui kerja sama yang dijalin dengan NGO dan LSM.

Di Kota Malang Pemerintah Kota dengan *NGO* atau pun LSM juga bekerjasama dalam masalah pengentasan pengangguran langsung yang ada pada tingkatan masyarakat lemah. *NGO* atau LSM yang ada di Kota Malang bekerja bersama dengan pemerintah guna menangani pengangguran yang menimpa para *client* yang mereka tangani. *Client* yang dimaksud disini adalah

orang-orang yang terdaftar dalam penanganan mereka. Meskipun Pihak *NGO* atau pun LSM seperti Yayasan Bhakti Luhur dan Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) memiliki program tersendiri guna memberikan pelatihan kerja kepada pra *clientnya* tapi tidak jarang pula pemerintah menyalurkan tenaga kerja yang ditampung oleh LSM dan *NGO* yang di Kota Malang untuk dipekerjakan dipihak-pihak tertentu yang telah menjalin kerjasama dengan pemerintah guna memperkerjakan golongan masyarakat lemah seperti penyandang disabilitas. Hal ini diungkapkan pula oleh dr. Djoko Witjaksono selaku ketua II YPAC Kota Malang dalam hasil wawancara sebagai berikut:

“.....Memang pihak kami (YPAC) bekerja sama dengan pemerintah kota. Selain pada bidang pendanaan, juga pada sektor penyaluran tenaga kerja untuk client-client kita. Hal ini memang baru dimulai mas, dan hal ini pun meski pun tidak banyak tapi keadaan ini masih lebih baik dari pada dulu-dulu yang tidak sama sekali .”

Guna membentuk ketahanan guna menahan resiko serta dampak bencana sosial yang dapat timbul di perkotaan pada tahapan pendekatan berbasis masyarakat dibutuhkan kerjasama antara pemerintah dengan pihak *NGO* atau pun LSM. Meski pun Pemerintah Kota serta *NGO* atau pun LSM memiliki program yang masih sejalan namun yang dibutuhkan untuk dapat membentuk sebuah ketahanan yang *solid* adalah kerjasama berkesinambungan antara pemerintah dan *NGO/LSM* yang ada diperkotaan. Bila Diibaratkan manusia, pemerintah serta *NGO/LSM* adalah dua kepala dengan dua pemikiran berbeda sehingga dapat sangat rawan menimbulkan perbedaan dan perselisihan. Tapi, jika kedua *stakeholder* ini telah menjalin kerjasama guna mengatasi pengangguran

di Kota Malang maka dua kepala tersebut akan menajadi satu. Sehingga pada hasil akhirnya adalah akan membuat suatu kesatuan ketahanan yang kokoh di Kota Malang terutama pada bidang penanganan bahaya pengangguran.

Disisi lain, kerjasama yang dilakukan pemerintah dengan sektor swasta sangat berbeda dengan yang dilakukan dengan NGO, pada bagian ini pemerintah mau tidak mau baik secara langsung mau pun tidak langsung harus melibatkan sektor swasta untuk ikut serta berperan menunjang ketahanan kota.

Salah satu cara guna sektor swasta dapat berkontribusi dalam menyokong ketahanan kota adalah melalui donasi yang kemudian ditampung oleh pemerintah untuk diolah. Donasi atau dana yang diberikan oleh sektor swasta kepada pemerintah biasa disebut *CSR (Corporate Social Responsibility)*. CSR di Kota Malang sampai dengan 70% berasal dari perusahaan-perusahaan pengolahan tembakau hal ini diungkapkan oleh Indras Sri Citowati, Sp, MM. selaku Kepala Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Balita dan Anak Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Dinas Sosial Kota Malang sebagai berikut ini:

“.....CSR yang ada di Kota Malang ini dari perusahaan pengolahan tembakau saja mencapai 70%. Yah dana inilah yang kami gunakan untuk memberikan pelatihan, memberikan modal usaha dan kegiatan-kegiatan lain yang bersifat sosial”

Melalui dana ini, pemerintah dapat menyelenggarakan pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Dinas Ketenagakerjaan yang kemudian memberikan bantuan modal berupa alat produksi untuk memperluas usaha milik para pengusaha yang akan berkembang mau pun para peserta pelatihan yang sebelumnya menganggur. Sehingga dari hal tersebut dapat berdampak pada

pengurangan angka pengangguran di Kota Malang. Hal senada juga diungkapkan oleh Bu Indras Sri Citowati, Sp, MM. selaku Kepala Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Balita dan Anak Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Dinas Sosial Kota Malang.⁸

“.....Dalam bebrapa kegiatan kami juga melibatkan pihak swasta untuk membantu mendanai suatu kegiatan yang bertema sosial. Selain itu, Kami juga membantu menjembatani antara pihak swasta dengan NGO/LSM yang bergerak dibidang penanganan anak-anak terlantar, penyandang disabilitas atau apa pun yang tergolong dalam penanganan masyarakat-masyarat lemah.”

Selain menjadi penjemabatan langsung untuk para pengangguran yang ada didalam naungan NGO dan LSM guna menemukan pekerjaan yang tersedia di sektor swasta , pemerintah Kota Malang dalam hal menjembatani antara NGO atau pun LSM dengan pihak Swasta juga dapat dilakukan dengan cara menyalurkan CSR (Corporate Social Responsibility) yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Malang kepada NGO atau LSM yang membutuhkan bantuan untuk mendanai kegiatan NGO atau LSM itu sendiri yang berkaitan dengan dukungan terhadap ketahanan kota yang dilakukan secara langsung atau pun tidak langsung. CSR yang digunakan untuk membantu pendanaan kegiatan-kegiatan sosial ini paling sering adalah dana hibah produk olahan tembakau. Seperti yang kita ketahui bahwa di Kota Malang sendiri terdapat 43 perusahaan industri rokok, yang jika dihitung dari total 894

⁸ Wawancara penelitian dengan Bu Indras Sri Citowati, Sp, MM. selaku Kepala Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Balita dan Anak Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Dinas Sosial Kota Malang pada tanggal 23 Januari 2018.

perusahaan yang ada di Kota Malang.⁹ Jika diprosentasekan perusahaan olahan tembakau menjadi rokok saja menempati 20,7% perusahaan yang ada di Kota Malang sehingga dana hibah yang didapatkan sangat mencukupi untuk menutupi kebutuhan yang diperlukan untuk membantu kegiatan LSM serta NGO di Kota Malang.

Selain peran aktif dari pihak dinas sosial, sebagai gambaran yang lebih jelas mengenai kinerja pemerintah Kota guna menekan angka pengangguran, dinas ketenagakerjaan juga melakukan pelatihan dan pendampingan mengembangkan wirausaha baru atau sederhana membantu berkembangnya suatu usaha yang memiliki sebuah potensi, tentu akan berdampak pada terserapnya tenaga kerja. Disisi lain, para peserta yang mengikuti pelatihan yang diadakan oleh dinas sosial sehingga para pengangguran jadi memiliki sebuah pekerjaan yang menjadikan mereka kembali menjadi individu yang produktif dan dapat menghasilkan sesuatu.

Mendukung kerjasama antara publik (masyarakat) dan swasta dapat didefinisikan pemerintah sebagai penjemputan antara keduanya. Dalam hal ini pemerintah Kota Malang telah sangat baik menjadi penjemputan antara keduanya, utamanya dalam bidang ketenagakerjaan. Tiap Tahun setidaknya satu kali Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Ketenagakerjaan mengadakan *Job Market Fair* untuk mempertemukan pencari kerja dan pengangguran untuk mengisi lowongan yang ada. Selain *Job Market Fair* yang diselenggarakan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Malang juga terdapat *Job Market Fair* lain yang diselenggarakan oleh universitas-universitas yang ada di Kota Malang. Sehingga informasi mengenai pekerjaan dapat diperoleh dengan mudah oleh para

⁹ <https://disnaker.malangkota.go.id/database/data-perusahaan/> diakses pada tanggal 23 Januari 2018 jam 07.50 WIB

penangguran. Selain *Job Market Fair* yang melibatkan pihak swasta secara langsung dalam menyokong ketahanan kota utamanya mengenai bahaya pengangguran.

Selain *Job Market Fair* yang diadakan Disnaker Kota Malang, kerjasama yang dilakukan untuk mendukung hubungan kerjasama antara masyarakat dan swasta dalam bidang menurunkan angka pengangguran yang dijembatani oleh pemerintah tidak berhenti sampai disana. Dinas Sosial bekerjasama dengan beberapa pihak swasta baik berupa perorangan ataupun perusahaan menyalurkan tenaga-tenaga kerja yang merupakan pengangguran dari golongan masyarakat lemah. Sebagai contoh beberapa panti pijat tuna netra yang ada di Kota Malang menggunakan tenaga kerja yang berasal dari para penyandang disabilitas yang telah diberikan pelatihan oleh Dinas Sosial Kota Malang.

Guna menjamin kesejahteraan dan memberikan perlindungan kepada pekerja yang ada di Kota Malang yang merupakan wilayah pemerintahan dibawah provinsi Jawa Timur, Pemerintah provinsi telah mengeluarkan aturan tentang hal tersebut yang tertuang dalam **“Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Ketenagakerjaan”** yang mana dalam peraturan daerah tersebut telah dijelaskan dan diatur mengenai pemberian upah kepada para pekerja dan pemberian jaminan perlindungan kepada pekerja. Jumlah upah minimum yang dibayarkan kepada para pekerja disesuaikan tiap wilayah. Hal ini tertuang dalam **“Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 121 Tahun 2016 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2017”** yang mana pada saat itu upah minimum Kota Malang adalah sejumlah Rp.

2.272.167,50 (dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu seratus enam puluh tujuh lima puluh rupiah).

Kebijakan yang dijalankan pemerintah dengan bekerjasama dengan sektor swasta saat ini selain hal-hal yang telah disebutkan diatas guna menurunkan angka pengangguran adalah kebijakan pemerintah mengirim tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa hal ini diatur dalam **“Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri”**. Pada awal kebijakan ini berjalan pemerintah membuat program-program yang mana hanya ditangani oleh pemerintah sendiri tapi setelah sekian waktu berjalan, program-program milik pemerintah mengenai pengiriman tenaga kerja ke luar negeri begitu berkembang sehingga memunculkan pihak-pihak dari sektor swasta untuk turut campur dalam hal ini karena melihat keuntungan didalamnya. Seiring dengan berkembangnya sektor swasta yang juga mampu mengirim tenaga kerja ke luar negeri, pada akhirnya saat ini pemerintah menggandeng sektor-sektor swasta yang bergerak dalam bidang pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri untuk melakukan kerjasama secara berkelanjutan. Peran sektor swasta disini adalah mencari peluang kerja dan menyalurkan tenaga kerja Indonesia sedangkan pemerintah adalah sebagai pemberi legalitas, perlindungan, penanungan dan pembekalan akhir kepada para pekerja Indonesia yang akan bekerja di luar negeri. Hal ini pula diterapkan di Kota Malang yang mana bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia. Dapat dilihat juga di kota malang terdapat beberapa pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta (PPTKIS) atau biasa disebut penyalur tenaga kerja Indonesia (PJTKI) di Kota Malang yang resmi seperti

PT. Alkurnia Sentosa Internasional yang ada di JL. S. Supriadi, lalu PT. Avida Aviduta yang berada di JL. Dieng dan lain sebagainya. Perusahaan-perusahaan tersebut adalah perusahaan yang telah mendapat izin dari pemerintah (legal) yang tentunya telah mengadakan kerja sama dengan pemerintah.

c. Lingkungan Kebijakan

Berjalannya sebuah kebijakan juga ditentukan dari keadaan dimana kebijakan tersebut dijalankan. Hal yang paling mempengaruhi berjalannya sebuah kebijakan yang pertama adalah keadaan sosial-ekonomi serta kemajuan teknologi. Mengenai keadaan sosial Kota Malang, pada tingkat pendidikan Kota Malang dapat dilihat pada **tabel 5** bahwa angka penduduk yang tidak/belum pernah sekolah pada tahun 2015-2016 sangatlah sedikit apabila dibandingkan dengan penduduk yang tengah atau tidak lagi sekolah. Sehingga dapat diambil sebuah gambaran berdasarkan pada data yang terdapat **tabel 5** mengenai pendidikan di Kota Malang bahwa hampir seluruh penduduk yang tinggal di Kota Malang pernah mengenyam pendidikan. Setidaknya sampai dengan pendidikan wajib 9 tahun atau sampai dengan usia 15 tahun hampir seluruh penduduk Kota Malang telah mendapatkannya dan hanya menyisakan 1,05 persen pada tahun 2015 dan 4,25 persen pada tahun 2016.

Menyinggung masalah pendidikan, pada jaman sekarang ini dapat dilihat bahwa pendidikan bukan lagi dipandang sebagai sebuah kebutuhan biasa tapi sudah menjadi sebuah kebutuhan primer bagi masyarakat. Di Kota Malang sendiri pada tahun 2017 angka pengangguran paling tinggi diduki mereka yang menempuh jalur pendidikan SLTA/SMA yang mencapai 1769 pengangguran kemudian yang paling sedikit adalah mereka yang mampu menempuh jenjang

pendidikan hingga S2. Namun, dari hal ini masih belum dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa jenjang pendidikan dapat menentukan tingginya angka pengangguran.

Selain dari hal tersebut penyebab pengangguran juga disinggung mengenai perubahan kondisi perekonomian suatu daerah yang mengalami. Guna melihat perekonomian suatu daerah atau kota, hal paling efektif untuk melakukannya adalah dari melihat laporan PDRB daerah atau Kota itu sendiri.

Dapat dilihat pada Pada **Tabel 11** dilihat bahwa sektor dengan PDRB paling tinggi adalah Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan angka PDRB mencapai Rp. 9 353 673,9 (dalam satuan juta) pada tahun 2010 dan terus berkembang hingga tahun 2016 angka PDRB pada sektor ini mencapai Rp. 13 844 817,3 (dalam satuan juta). Tahun 2010 hingga 2011 dapat dilihat pada **Tabel 12** sektor ini mengalami perkembangan sebanyak 7,51 %. Pada **Tabel 12** dapat dilihat bahwa hingga pada tahun 2016 jumlah total perkembangan PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor adalah mencapai 40,55 %. Angka pertumbuhan PDRB Kota Malang yang paling tinggi adalah pada sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial dengan total perkembangan dari tahun 2011 hingga 2016 mencapai 60,96 %.

Jika sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yang merupakan sektor dengan PDRB paling besar di Kota Malang ini mengalami penurunan atau bahkan kemerosotan sudah pasti akan berdampak naiknya angka TPT Kota Malang. Hal tersebut dikarenakan jika sampai PDRB pada satu bidang mengalami penurunan apalagi penurunan tersebut sangat signifikan dapat diidentifikasi bahwa perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang tersebut

tengah mengalami masalah dan bila permasalahan-permasalahan tersebut terus dibiarkan akan dapat menyebabkan perusahaan mengalami kebangkrutan yang berujung pada pemecatan karyawan-karyawan yang di perusahaan. Selain pada sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, PDRB Kota Malang yang memiliki tingkat perkembangan paling tinggi juga turut berperan dalam penyerapan tenaga kerja yang ada di Kota Malang. Angka pertumbuhan PDRB Kota Malang yang paling tinggi adalah pada sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial dengan total perkembangan dari tahun 2011 hingga 2016 mencapai 60,96 %. Apabila sektor ini mengalami hambatan kemudian mengalami kemunduran tentu juga akan berdampak langsung pada TPT Kota Malang. yang mana dengan tinggi angka perkembangan sektor ini tiap tahunnya juga dapat diidentifikasi bahwa tiap tahunnya dari sektor ini juga akan menunjukkan perkembangan dalam penyerapan tenaga kerja karena kuantitasnya semakin banyak.

Berbagai uraian di atas telah menunjukkan bahwa pengangguran yang ada di Kota Malang sangatlah majemuk. Berbagai macam faktor tercampur aduk sehingga menyebabkan angka pengangguran begitu tinggi di Kota Malang bahkan sampai menyebabkan Kota Malang tidak pernah memiliki TPT yang lebih rendah dari Jawa Timur selama lima tahun terakhir yakni pada tahun 2011 hingga pada tahun 2015.

Tingkat kemajemukan penanggungan di Kota Malang yang begitu tinggi menjadi sebuah kendala untuk berjalannya implementasi-implementasi kebijakan pengentasan pengangguran. Dukungan masyarakat menjadi salah satu tonggak penting dalam menguraikan permasalahan mengenai pengangguran di Kota

Malang. Banyak kebijakan serta program utamanya yang menyangkut permasalahan mengenai pengangguran yang membutuhkan dukungan dari masyarakat.

Masyarakat Kota Malang sendiri memanfaatkan kemajuan teknologi guna menyebarkan informasi mengenai lowongan pekerjaan yang ada. Sehingga masyarakat tidak serta merta hanya berpangku tangan pada pemerintah dan menunggu *event job fair* diselenggarakan. Baik lewat media sosial *facebook* atau pun *instagram* masyarakat Kota Malang saling menyebarkan informasi pekerjaan lewat forum-forum yang ada di media sosial tersebut.

Selain kondisi masyarakat yang mendukung keadaan turunnya angka pengangguran. Pada setiap kebijakan serta program yang dijalankan oleh pemerintah kota melalui Dinas Sosial dan Dinas Ketenagakerjaan, selalu dilakukan evaluasi pada setelah berjalannya kebijakan tersebut. Sehingga kebijakan serta program yang dijalankan pada tiap tahunnya akan semakin baik. Komitmen ini dapat dilihat pada penyelenggaraan pelatihan-pelatihan, *event-event* pameran hasil peserta pelatihan mau pun *event job fair* yang diadakan tiap tahun.

5.2 Hambatan Turunnya Angka Pengangguran Dari Segi Strategi Yang Diterapkan Pemerintah Kota Malang

Penjabaran pada poin sebelumnya telah menggambarkan berjalannya implementasi kebijakan mengenai strategi pemerintah Kota Malang menurunkan angka pengangguran guna menyokong ketahanan kota. Namun, pada data terakhir juga menjadi sebuah bantahan telak bagi pemerintah Kota Malang bahwa program yang dijalankan menuai berbagai hambatan sehingga angka TPT di Kota Malang masih lebih tinggi di bandingkan angka TPT Jawa Timur pada lima tahun terakhir

yakni pada tahun 2011-2015. Berikut adalah penyebab dari angka pengangguran terbuka di Kota Malang tidak pernah lebih rendah dari angka TPT Jawa Timur:

1. Intensitas dijalankannya kebijakan serta program pengentasan pengangguran di Kota Malang sangatlah kurang. Bahkan menurut penuturan yang di dapat oleh peneliti dari wawancara-wawancara yang dilakukan, program-program seperti pelatihan kerja atau wirausaha yang dilakukan hanya berlangsung satu tahun hanya 2-3 kali. Hal ini diungkapkan oleh Bu Indras Sri Citowati, Sp, MM selaku Kepala Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Balita dan Anak Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Dinas Sosial Kota Malang sebagai berikut:

“.....iya mas kami juga punya beberapa program pelatihan kerja atau pun wirausaha. Hal tersebut juga diberengi dengan pemberian modal sekaligus mencarikan pasar. Hal tersebut biasanya kami lakukan 2 sampai 3 kali dalam satu tahunnya”

Selain dari penuturan diatas dari pihak dinas ketenagakerjaan pun memiliki hambatan yang tidak jauh berbeda dalam melaksanakan program-program yang ada. Hal tersebut turut diungkapkan oleh Drs. Hendro Suyoto, MM Kepala seksi Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Malang seabagai berikut:

“.....Biasanya program-program kami, dilaksanakan 1 samapai 2 kali dalam setahun, itu yang dilakukan oleh Dinas kami sendiri. Namun, kami juga sering mengadakan kerjasama dengan pihak-pihak lain sehingga terkadang bisa lebih dari itu. Misalnya kerjasama yang paling sering kami lakukan adalah mengenai pelatihan yang mana kami menggunakan tenaga ahli atau yang professional dalam bidang tersebut, selain itu juga

kami sering melakukan kerja sama dengan institusi pendidikan guna mengadakan job fair.”

Tingkat intensitas program-program pengentasan pengangguran ini tentu sangat kurang, karena jumlah pengangguran di Kota Malang yang terus bertambah dikarenakan adanya urbanisasi, jumlah lulusan dari bidang pendidikan, semakin tingginya standarisasi dalam bekerja dan lain sebagainya.

2. Kuantitas yang disediakan untuk program-program seperti pelatihan dan pemberian modal sangatlah terbatas yang jika ditotal dalam setahun jumlah penyerapan tenaga kerja dari program yang dilakukan pemerintah hanya berjumlah ratusan. Hal ini berdasar pada wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bu Indras Sri Citowati, Sp, MM selaku Kepala Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Balita dan Anak Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Dinas Sosial sebagai berikut:

“.....Kapasitas yang kami sediakan dalam satu kali pelatihan biasanya mencapai 30-50 peserta. Hal tersebut juga biasanya dilakukan tidak hanya satu tapi beberapa kali sesi. Jadi kami memberikan pelatihan itu secara keseluruhan termasuk mengenai menejerial”

Tidak jauh berbeda dengan dinas sosial, kapasitas yang disediakan oleh dinas ketenagakerjaan juga sangat minim bahkan lebih sedikit. Hal tersebut diungkapkan oleh Drs. Hendro Suyoto, MM Kepala seksi Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Malang sebagai berikut:

“.....Biasanya dalam sekali pelatihan kerja kami menyediakan kapasitas hingga mencapai 30-40 peserta saja. Sedangkan untuk pemodalannya

kami hanya memberikan kepada mereka yang sebelumnya sudah memiliki embrio usaha dan sedang berkembang. Jumlahnya tidak pasti, mereka ini juga kan ikut pelatihan tapi yang menejerial, jadi kami memberikan modal hanya pada mereka yang menampilkan progress yang terbaik. Untuk kapasitasnya biasanya kami ambil 10 yang terbaik.”

Dengan kuantitas yang hanya berkisar ratusan peserta yang mendapatkan program-program tersebut tentulah hal ini sangat kurang mengingat dalam satu tahun jumlah pengangguran di Kota Malang bisa bertambah sampai ribuan.

3. Variasi kebijakan yang disediakan oleh pemerintah sangatlah kurang. Hal ini dapat dilihat dari program-program yang dikeluarkan pemerintah Kota Malang dalam mengatasi pengangguran hanya membantu mereka yang tergolong pengangguran struktural tapi tidak dengan mereka yang pengangguran musiman, dan lain sebagainya.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Penelitian dilakukan peneliti adalah melihat bagaimana strategi pemerintah kota yang didalamnya termuat kebijakan dan program-program kerja guna menurunkan angka pengangguran dapat menyokong ketahanan kota. Dalam hal ini ketahanan kota dapat dikatakan tersokong oleh strategi pemerintah apabila kebijakan dan program pemerintah tersebut berjalan sesuai yang direncanakan dan dapat menekan angka pengangguran hingga sampai pada tingkatan lebih rendah dari pada TPT yang dimiliki oleh provinsi Jawa Timur. Guna melihat pelaksanaan implementasi kebijakan serta program dimiliki pemerintah Kota Malang, peneliti menggunakan teori Daniel Mazmanian dan Paul A.Sabatier. Didalam model implementasi yang di ungkap kan oleh Daniel Mazmanian dan Paul A.Sabatier setidaknya terdapat 3 poin utama untuk melihat berjalannya implementasi sebuah kebijakan yakni: karakteristik masalah, karakteristik kebijakan, dan lingkungan kebijakan. Dari ketiga hal ini diuraikan lagi guna melihat implementasi kebijakan serta program yang terkait strategi pemerintah Kota Malang guna menurunkan angka pengangguran.

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan dari hasil penelitian serta pembahasan tentang strategi pemerintah Kota Malang menurunkan angka pengangguran guna menyokong ketahanan kota dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan serta program yang dijalankan oleh pemerintah Kota Malang dalam menurunkan angka pengangguran dirasa masih kurang

maksimal atau juga bisa dikatakan belum berjalan secara optimal. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan hal tersebut dikarenakan, karakteristik permasalahan itu sendiri yang sudah tergolong runyam. Kemudian, tingkat kemajemukan pengangguran di Kota Malang sangatlah beragam selain itu kinerja dari satu instirusi dengan institusi lain (dinas sosial dan dinas ketenagakerjaan) terkesan tumpang tindih dalam hal penanganan pengangguran di Kota Malang. Selain itu, tersendatnya permasalahan mengenai penyerapan tenaga kerja akibat minimnya intensitas dan kuantitas juga dapat diidentifikasi kurangnya alokasi dana yang tersedia.

2. Hambatan-hambatan dalam turunnya angka pengangguran di Kota Malang dari segi strategi yang diterapkan dapat diidentifikasi sebagai berikut:
 - 1 .Tingkat intensitas kebijakan dan program yang dijalankan oleh pemerintah Kota Malang. Seperti pada program-program pelatihan dan pemodalan usaha yang hanya dilakukan dalam satu tahun berjumlah 1-3 kali saja.
 2. Kuantitas yang disediakan untuk program-program yang ada. Kapasitas yang disediakan oleh pihak pemerintah Kota Malang dalam hal ini Dinas Sosial dan Dinas Ketenagakerjaan yang hanya mencapai ratusan dalam periode satu tahun. Hal ini terbilang sangat minim bila dibandingkan dengan kemungkinan jumlah pengangguran yang tumbuh mencapai ribuan dalam satu tahunnya.
 3. Selain dari pada itu, variasi kebijakan yang dimiliki pemerintah pun dirasa sangat kurang oleh peneliti. Dengan begitu majemuknya jenis pengangguran di Kota Malang seharusnya pemerintah Kota Malang juga turut menyiapkan

berbagai macam variasi kebijakan untuk mengatasi berbagai jenis pengangguran yang ada.

6.2 Saran

Diharapkan penelitian tentang strategi pemerintah kota menurunkan angka pengangguran guna menyokong ketahanan kota dapat dikembangkan dan diperdalam lagi menggunakan berbagai macam terori yang berbeda uuna memahami proses berjalannya suatu strategi guna menyokong ketahanan kota.



Buku :

Holzman, Robert, Lyne Sherburne-Benz, Emil Tesliuc, *Social Risk Management: The World bank's Approach To Social Protection In A Globalizing World*, Social, Washington D.C : Social Protection Departemen The World Bank, 2003

Jha, Abhas K., Todd W. Miner, Suzana Stanton-Geddes (eds.) (2013), *Building Urban Resilience : Principe, tools and practice*, Washington DC : The World Bank

Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cetakan Ketigabelas, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006

Mankiw, Gregory N., *Pengantar Ekonomi Makro*, Edisi Ketiga, Jakarta: Salemba Empat, 2006

Miles, Mathew B.A, Michael Huberman, Saldana, *Analisis data kualitatif*, Jakarta: UI Press, 2014

Nazir, M., *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988

Sukirno, Sandono, *Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan Pembangunan*, Jakarta: UI Press, 2000

Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2015

The World Bank, *Investing In Urban resilience: Protecting and Promoting Development In A Changing World*, Washington D.C : The World Bank, 2015

Jurnal :

Ridho, M. Faruk Rosya, *Pengangguran dan Pembangunan Perkotaan (Studi Kasus: Kota Palembang)*, Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, Vol. 21 No. 1, 2010

Holzman, Robert, Steen Jorgensen. *Social Risk Management: A new conceptual framework for Social Protection and beyond*, Social Protection Discussion Paper No. 0006, 2000

Purwanto, Slamet Agus, Sumartono, M. Makmur, *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MEMUTUS RANTAI KEMISKINAN (Kajian di Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto)*, Vol. 16 No. 2, 2013

Wawancara:

Wawancara penelitian dengan Bu Indras Sri Citowati, Sp, MM. selaku Kepala Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Balita dan Anak Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Dinas Sosial Kota Malang pada tanggal 23 Januari 2018.

Wawancara penelitian dengan Bu Indras Sri Citowati, Sp, MM. selaku Kepala Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Balita dan Anak Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Dinas Sosial Kota Malang pada tanggal 23 Januari 2018.

Wawancara penelitian dengan bapak Drs. Hendro Suyoto, MM selaku Kepala seksi Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Malang pada tanggal 2 Febuari 2018.

Wawancara penelitian dengan Bu Indras Sri Citowati, Sp, MM. selaku Kepala Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Balita dan Anak Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Dinas Sosial Kota Malang pada tanggal 23 Januari 2018.

Wawancara penelitian dengan bapak Drs. Hendro Suyoto, MM selaku Kepala seksi Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Malang pada tanggal 2 Febuari 2018.

Wawancara penelitian dengan Bu Indras Sri Citowati, Sp, MM. selaku Kepala Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Balita dan Anak Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Dinas Sosial Kota Malang pada tanggal 23 Januari 2018.

Internet:

https://malangkota.bps.go.id/website/pdf_publicasi/Ringkasan-Eksekutif/Ketenagakerjaan-Kota-Malang-Tahun-2015.pdf hlm 30 diakses pada 15/5/2017

<https://malangkota.go.id/sekilas-malang/geografis/> diakses pada 19/1/2018 jam 14.30 WIB

E-Book:

Kodoatie, R.J. dan Sjarief, R., *Tata Ruang Air*, Yogyakarta: ANDI, 2010

Undang-Undang:

UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah

UU No. 18 Tahun 1965 Tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah

Lain-Lain:

Berita Resmi Statistik. Keadaan Ketenagakerjaan Jawa Timur Tahun 2015
https://jatim.bps.go.id/4dm!n/brs_ind/brsInd-20151105142005.pdf
diakses pada 15/5/2017

Kota Malang Dalam Angka Tahun 2017 Diakses melalui
<https://malangkota.bps.go.id/publication/2017/08/12/af218a8b74d037b3f9d87c85/kota-malang-dalam-angka-2017> pada 3/1/2018 jam 07.00 WIB

Laporan Kerja Tahunan Kota Malang Tahun 2015
<http://malangkota.go.id/dokumen-daerah/lakip/> diakses pada 15/5/2017

Ringkasan Eksekutif Ketenagakerjaan Kota Malang Tahun 2015.
<https://malangkota.bps.go.id/index.php/publikasi/97> diakses pada
15/5/2017

